

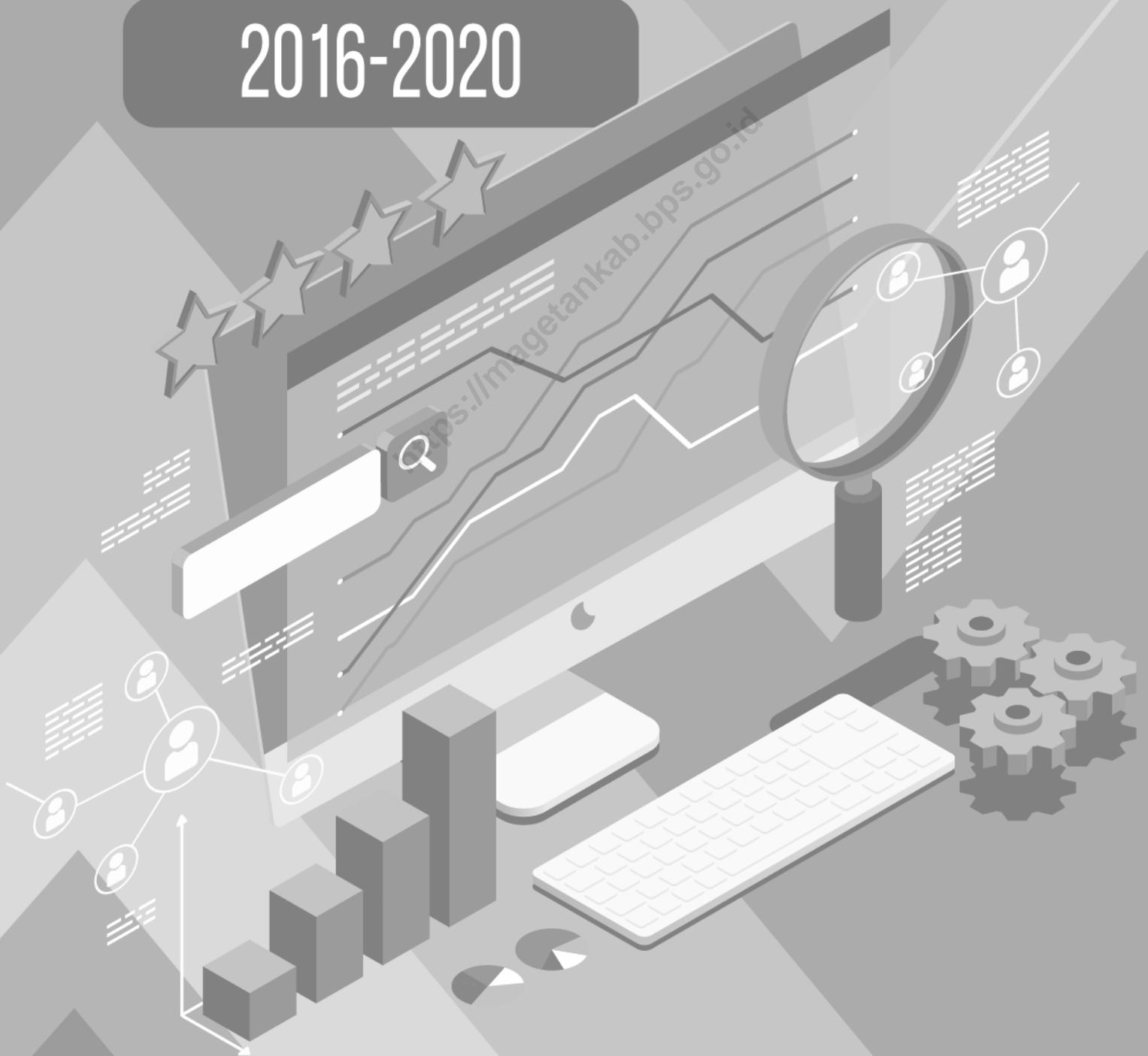
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN MAGETAN MENURUT PENGELUARAN

2016-2020



PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN MAGETAN MENURUT PENGELUARAN

2016-2020



**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KABUPATEN MAGETAN MENURUT PENGELUARAN
2016 – 2020**

ISSN	: 2797-5177
Nomor Katalog	: 9302023.3520
Nomor Publikasi	: 35200.2104
Ukuran Buku	: 21 x 29,7 cm
Jumlah Halaman	: xii + 76
Naskah	: BPS Kabupaten Magetan
Penyunting	: BPS Kabupaten Magetan
Desain Cover	: BPS Kabupaten Magetan
Diterbitkan Oleh	: BPS Kabupaten Magetan
Dicetak Oleh	: CV. Azka Pratama Putra

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

TIM PENYUSUN

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN MAGETAN MENURUT PENGELUARAN TAHUN 2016–2020

Pengarah :

Ribut Hadi Candra, SH.,MM

Penanggung Jawab :

Khikmah Pancawati, SE.

Penyunting :

Khikmah Pancawati, SE.

Penulis dan Pengolah Data :

Ima Sartika Dewi, S.ST.

Desain Layout :

Ima Sartika Dewi, S.ST.

KATA PENGANTAR

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah. Perangkat data ini dapat pula digunakan untuk kepentingan dan tujuan lain, seperti sebagai dasar pengembangan model-model ekonomi dalam rangka menyusun formulasi kebijakan, tingkat percepatan uang beredar (*velocity of money*), pendalaman sektor keuangan (*financial deepening*), penetapan pajak, kajian ekspor dan impor dan sebagainya.

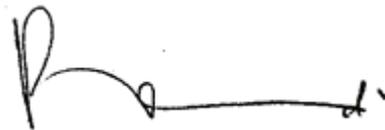
Publikasi ini merupakan publikasi tahunan, secara khusus membahas PDRB menurut pengeluaran/permintaan akhir, yang dirinci menjadi beberapa komponen, yaitu: Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori), serta Ekspor dan Impor. Data PDRB dalam publikasi ini serta publikasi yang akan datang menggunakan tahun dasar 2010, serta sudah menerapkan konsep *System of National Accounts 2008* seperti yang direkomendasikan oleh *United Nations*.

Kepada instansi pemerintah dan lembaga/perusahaan swasta yang telah memberikan dukungan data diucapkan terima kasih. Semoga kerjasama yang telah terjalin dapat terus berlanjut serta dapat ditingkatkan di masa-masa mendatang.

Akhirnya, semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Magetan, April 2021

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN MAGETAN



Ribut Hadi Candra, S.H.,M.M.
NIP. 19720708 199203 1 004

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	viii
Daftar Grafik	x
Daftar Lampiran	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	3
1.2. Perubahan Tahun Dasar PDRB.....	6
BAB II METODA ESTIMASI DAN SUMBER DATA	11
2.1 Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT)	13
2.2 Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT (PK-LNPRT)	15
2.3 Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P)	17
2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	19
2.5 Perubahan Inventori (PI)	22
2.6 Ekspor - Impor	25
BAB III TINJAUAN PEREKONOMIAN KABUPATEN MAGETAN MENURUT PDRB PENGELUARAN KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2016 - 2020	27
3.1 Perkembangan PDRB Pengeluaran	29
3.2 Perkembangan Komponen PDRB Pengeluaran	33
3.2.1 Perkembangan Konsumsi Akhir Rumah Tangga	33
3.2.2 Perkembangan Konsumsi Akhir LNPRT	38
3.2.3 Perkembangan Konsumsi Akhir Pemerintah	39
3.2.4 Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	42

3.2.5	Perubahan Inventori	44
3.2.6	Ekspor Barang dan Jasa	45
3.2.7	Impor Barang dan Jasa	46
BAB IV	PERKEMBANGAN AGREGAT PRDB PENGELUARAN KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2016-2020.....	49
4.1	PDRB (Nominal)	51
4.2	Perbandingan Penggunaan PDRB untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor.....	52
4.3	Perbandingan Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	53
4.4	Proporsi Konsumsi Akhir terhadap PDRB	53
4.5	Perbandingan Ekspor terhadap PMTB	54
4.6	Perbandingan PDRB terhadap Impor	55
4.7	Keseimbangan Total Penyediaan dan Total Permintaan	55
4.8	Neraca Perdagangan (<i>Trade Balance</i>)	56
4.9	<i>Incremental Capital Output Ratio</i> (ICOR)	58
	PENUTUP	61
	LAMPIRAN	65
	DAFTAR PUSTAKA	73

DAFTAR TABEL

Tabel 1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Magetan Tahun 2016-2020.....	30
Tabel 2	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Magetan Tahun 2016-2020.....	30
Tabel 3	Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran, Kabupaten Magetan Tahun 2016-2020.....	32
Tabel 4	Pertumbuhan Menurut Pengeluaran, Kabupaten Magetan Tahun 2016-2020.....	32
Tabel 5	Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Magetan, Tahun 2016-2020.....	33
Tabel 6	Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Magetan, Tahun 2016-2020.....	34
Tabel 7	Struktur Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Magetan, Tahun 2016-2020.....	36
Tabel 8	Pertumbuhan Riil Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Magetan, Tahun 2016-2020.....	37
Tabel 9	Perubahan Indeks Harga Implisit Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Magetan Tahun 2016-2020.....	38
Tabel 10	Perkembangan Penggunaan Konsumsi LNPRRT Kabupaten Magetan, Tahun 2016-2020.....	39
Tabel 11	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Magetan, Tahun 2016-2020.....	40
Tabel 12	Perkembangan dan Struktur PMTB Kabupaten Magetan, Tahun 2016-2020.....	43
Tabel 13	Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kabupaten Magetan, Tahun 2016-2020.....	44
Tabel 14	Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Magetan, Tahun 2016-2020.....	45
Tabel 15	Perkembangan Impor Barang dan Jasa Kabupaten Magetan, Tahun 2016-2020.....	47

Tabel 16	Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Magetan, Tahun 2016-2020.....	51
Tabel 17	Perbandingan PDRB Pengeluaran untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor Tahun 2016-2020.....	52
Tabel 18	Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB Tahun 2016-2020.....	53
Tabel 19	Proporsi Total Penggunaan Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kabupaten Magetan, Tahun 2016-2020.....	54
Tabel 20	Rasio Ekspor terhadap PMTB (ADHB) Tahun 2016-2020.....	54
Tabel 21	Rasio PDRB terhadap Impor Kabupaten Magetan Tahun 2014-2018....	55
Tabel 22	Sisi Keseimbangan Penyediaan dan Permintaan Kabupaten Magetan, Tahun 2016-2020.....	56
Tabel 23	Neraca Perdagangan Barang dan Jasa, Kabupaten Magetan Tahun 2016-2020.....	57
Tabel 24	Incremental Capital Output Ratio, Kabupaten Magetan, Tahun 2016-2020.....	58

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Perbandingan PDRB adh Berlaku dan adh Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Magetan, Tahun 2016-2020.....	31
----------	---	----

<https://magetankab.bps.go.id>

DAFTAR LAMPIRAN

Lamp 1	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Magetan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran 2016-2020.....	67
Lamp 2	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Magetan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran 2016-2020.....	68
Lamp 3	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Magetan Menurut Pengeluaran 2016-2020..	69
Lamp 4	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Magetan Menurut Pengeluaran 2016-2020	70
Lamp 5	Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100) Kabupaten Magetan Menurut Pengeluaran, 2016-2020.....	71
Lamp 6	Perubahan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100) Kabupaten Magetan Menurut Pengeluaran 2016-2020.....	72

<https://magetankab.bps.go.id>



Bab 1

PENDAHULUAN

<https://magisterlab.bps.go.id>

1.1 PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto menurut pengeluaran (PDRB Pengeluaran) merupakan salah satu bentuk tampilan data ekonomi suatu wilayah, di samping bentuk tampilan lain seperti PDRB menurut lapangan usaha, Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi, dan Neraca Arus Dana. Di dalam sistem kerangka kerja (*frame work*) data ekonomi suatu wilayah, PDRB Pengeluaran merupakan ukuran dasar (*basic measure*) yang menggambarkan penggunaan atas barang dan jasa (*product*) yang dihasilkan melalui aktivitas produksi. Dalam konteks ini, PDRB Pengeluaran itu menggambarkan hasil “akhir” dari proses produksi yang berlangsung dalam batas-batas teritori suatu wilayah. Berbagai jenis barang dan jasa akhir tersebut akan digunakan untuk memenuhi permintaan akhir oleh pelaku ekonomi domestik maupun pelaku ekonomi dari luar wilayah bahkan dari luar negeri. Beberapa agregat penting dapat diturunkan dari PDRB Pengeluaran ini seperti variabel Pengeluaran Konsumsi Akhir, pembentukan modal tetap bruto atau investasi fisik, serta ekspor dan impor.

Penghitungan PDRB melalui pendekatan pengeluaran (*expenditure*) tidak terlepas dari penghitungan PDRB melalui pendekatan lapangan usaha (*production*). Sungguhpun demikian, PDRB Pengeluaran diestimasi secara independen dengan menggunakan data dasar yang relatif berbeda. PDRB Produksi menggambarkan aktivitas produksi, serta pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi yang terlibat (balas jasa faktor produksi)¹. Sedangkan PDRB Pengeluaran menggambarkan aktivitas pengeluaran yang dilakukan para pelaku ekonomi untuk mendapatkan barang dan jasa yang diproduksi tersebut. Melalui PDRB Pengeluaran juga dapat dilihat keterkaitannya dengan penyediaan barang dan jasa yang berasal dari domestik maupun dari impor. Melalui hubungan ini terlihat titik keseimbangan makro antara sisi penyediaan (*supply side*) dan sisi permintaan (*demand side*) barang dan jasa.

Secara konsep² penghitungan PDRB dari sisi yang berbeda di atas dimaksudkan untuk: i) memastikan konsistensi dan kelengkapan di dalam membuat estimasi; ii) memberi manfaat lebih di dalam melakukan analisis; dan iii) mengontrol kelayakan hasil estimasi. Secara teoritis, kedua pendekatan tersebut akan menghasilkan nilai yang sama besar

¹Termasuk di dalamnya penyusutan dan pajak tidak langsung “neto” (pajak tidak langsung dikurangi subsidi)

²Handbook of National Accounting. Accounting for Production: Sources and Methods (Series F no 30 United Nations)

(*equivalent*). Namun karena pendekatan estimasi dan metoda pengukuran yang digunakan berbeda, maka akan muncul selisih statistik (*statistical discrepancy*).

Dengan demikian PDRB Pengeluaran menjelaskan besarnya nilai barang dan jasa (*output*) yang dihasilkan dalam wilayah domestik, yang digunakan sebagai konsumsi “akhir” oleh masyarakat. Secara spesifik, yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan barang dan jasa yang tidak dimaksudkan untuk diproses lebih lanjut (dikonsumsi habis). Penggunaan produk akhir tersebut diwujudkan dalam bentuk “permintaan akhir”. Permintaan akhir yang dimaksud terdiri dari komponen-komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah tangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Perubahan Inventori (PI), serta komponen Ekspor barang dan jasa.

Dalam menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi permintaan akhir masyarakat tersebut, tidak terlepas dari ketergantungan pada produk yang berasal dari luar wilayah atau luar negeri (impor). Berbagai barang dan jasa yang menjadi konsumsi akhir masyarakat di dalamnya akan terkandung produk impor. Sehingga dalam mengukur besarnya nilai tambah domestik (PDRB), komponen impor barang dan jasa harus dikeluarkan atau dikurangkan dari penghitungan konsumsi atau permintaan akhir. Tingginya permintaan tidak selalu diimbangi oleh penyediaan domestik, sehingga kondisi ini menjadi peluang bagi masuknya produk impor. Data empiris menunjukkan bahwa dari waktu ke waktu, perdagangan produk impor terus berkembang baik secara kuantitas, nilai, maupun ragamnya.

Secara konsep, PDRB Produksi (Y) sama besar dengan PDRB Pengeluaran (E), namun dalam kenyataannya tidaklah demikian. Selain berbeda dalam struktur atau komposisi, pendekatan pengukuran antar keduanya juga berbeda. Dalam penyajian data PDRB, perbedaan ini diletakkan pada sisi PDRB Pengeluaran. Unsur yang menyebabkan perbedaan tersebut antara lain adalah konsep dan basis pengukuran, metoda dan cakupan pengukuran, serta data dasar yang digunakan untuk estimasi. Melalui penjelasan ini para pengguna data PDRB tidak mempermasalahkan adanya perbedaan (*statistical discrepancy*) tersebut.

Penyusunan data **PDRB Pengeluaran** juga dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana “pendapatan” (Y) yang tercipta melalui proses produksi menjadi sumber

pendapatan masyarakat³, yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir.

Dari sudut pandang lain, PDRB Pengeluaran juga menjelaskan penggunaan dari sebagian besar produk domestik bruto untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir, atau dengan istilah yang berbeda disebut sebagai “**output akhir (final output)**”. Mengkaitkan antara pendapatan dan pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa dari produk domestik maupun impor (termasuk untuk diekspor) merupakan bentuk analisis yang sederhana dari data PDRB. Keharusan memiliki jumlah yang sama pada kedua model pendekatan PDRB tersebut, secara simultan dapat ditunjukkan melalui model atau persamaan *Keynesian* sbb :

$$Y = C + GFCF + \Delta \text{ Inventori} + X - M$$

Y (<i>Income</i>)	= PDRB Produksi
C (<i>Consumption</i>)	= Konsumsi akhir
GFCF (<i>Gross Fixed Capital Formation</i>)	= Pembentukan Modal Tetap Bruto
Δ Inventori	= Perubahan Inventori
X	= Ekspor
M	= Impor

Persamaan di atas menunjukkan pendapatan atau nilai tambah bruto dari hasil penghitungan PDRB Produksi akan “identik” dengan PDRB Pengeluaran. Jika Y adalah pendapatan, C adalah konsumsi akhir, dan GFCF serta Δ Inventori merupakan bentuk investasi fisik, maka selisih antara ekspor dengan impor menggambarkan surplus atau defisit dari aktivitas perdagangan barang dan jasa antar wilayah, baik dengan wilayah lain ataupun dengan luar negeri.

3. - Yang dimaksud adalah rumah tangga, pemerintah, lembaga non profit yang melayani rumah tangga serta sektor produksi (produsen) di wilayah domestik
- Disebut sebagai pendekatan “riil”
- Siklus ekonomi secara umum yang menjelaskan tentang hubungan antara balas jasa faktor produksi (pendapatan) dengan pengeluaran atas penggunaan berbagai produk barang dan jasa oleh faktor produksi tersebut

Melalui pendekatan ini dapat diketahui perilaku masyarakat dalam menggunakan pendapatan, apakah hanya untuk tujuan konsumsi (akhir) atau juga untuk tujuan investasi (fisik). Selain itu juga dapat diketahui besarnya ketergantungan ekonomi wilayah (domestik) terhadap luar negeri dalam bentuk perdagangan internasional (*external transaction*). Selisih antara ekspor dan impor juga disebut sebagai “ekspor neto” .

Sebagaimana PDRB Produksi, dari PDRB Pengeluaran juga dapat diturunkan berbagai data agregat tentang perekonomian wilayah seperti nilai nominal, struktur atau distribusi pengeluaran konsumsi akhir, pertumbuhan “riil”, serta indeks harga implisit. Data yang dimaksud tersedia baik untuk masing-masing komponen PDRB Pengeluaran maupun untuk total perekonomian.

1.2 PERUBAHAN TAHUN DASAR PDRB

Mengapa Tahun Dasar PDRB Perlu Diubah?

Selama sepuluh tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada kondisi perekonomian global maupun lokal, yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Krisis finansial global yang terjadi tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara China-ASEAN (CAFTA), perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional, serta semakin meluasnya jasa layanan pasar modal merupakan beberapa contoh perubahan yang perlu diantisipasi dalam mekanisme pencatatan data statistik nasional.

Satu bentuk implementasi dari *System of National Accounts (SNA)* adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB/PDRB. Di Indonesia kegiatan perubahan tahun dasar dari tahun 2000 ke 2010 dilakukan bersamaan dengan upaya mengimplementasi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam buku panduan SNA2008. Kegiatan ini diawali dengan menyusun kerangka kerja dalam bentuk *Supply and Use Tables (SUT)* Indonesia untuk tahun data 2010. Dari kerangka SUT tersebut diperoleh nilai estimasi PDB dan komponen-komponennya. Selanjutnya nilai PDB maupun komponennya ini dijadikan sebagai acuan (*benchmark*) ketika BPS Provinsi maupun BPS Kabupaten/Kota menyusun PDRB-nya. Untuk itu, guna menjaga konsistensi dengan hasil penghitungan PDB, maka perubahan tahun dasar PDRB dilakukan secara simultan dengan perubahan tahun dasar PDB.

Apa yang Dimaksud dengan SNA 2008?

SNA2008 merupakan rekomendasi internasional tentang tata cara pengukuran aktivitas ekonomi, yang telah sesuai dengan penghitungan konvensional berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi. Rekomendasi dinyatakan dalam sekumpulan konsep, definisi, cakupan, dan klasifikasi, serta aturan neraca yang disepakati secara internasional dalam mengukur indikator ekonomi makro (*account*) seperti PDB/PDRB.

SNA dirancang guna menyediakan informasi tentang aktivitas yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi, utamanya aktivitas produksi, konsumsi, dan aktivitas akumulasi aset fisik. SNA dapat dimanfaatkan antara lain untuk kepentingan analisis, perencanaan dan penetapan kebijakan ekonomi. Melalui kerangka SNA, fenomena suatu perekonomian wilayah dapat dijelaskan dan dipahami dengan lebih baik.

Apa Manfaat Perubahan Tahun Dasar?

Manfaat perubahan tahun dasar PDRB diantaranya adalah:

- a. Menginformasikan kondisi ekonomiterkini, seperti terjadinya perubahan struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- b. Meningkatkan kualitas PDRB;
- c. Menjadikan PDRB dapat diperbandingkan secara nasional.

Apa Implikasi Perubahan Tahun Dasar?

Perubahan tahun dasar PDRB antara lain berdampak pada:

- a. Meningkatkan nilai PDRB, yang pada gilirannya berpengaruh pada perubahan kelompok pendapatan (dari wilayah berpendapatan rendah menjadi menengah atau tinggi), serta pergeseran struktur ekonomi;
- b. Perubahan besaran indikator makro seperti rasio pajak, rasio hutang, rasio investasi dan tabungan, neraca perdagangan, serta struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- c. Perubahan input data untuk keperluan *modeling* dan *forecasting*.

Mengapa Tahun 2010 sebagai tahun dasar?

Terpilihnya tahun 2010 sebagai tahun dasar didasarkan atas beberapa alasan sbb:

- Perekonomian Indonesia pada tahun 2010 relatif stabil;
- Terjadinya perubahan struktur ekonomi Indonesia selama 10 (sepuluh) tahun terakhir, terutama di bidang informasi, teknologi dan transportasi. Perubahan ini berpengaruh pada pola distribusi dan munculnya beberapa produk baru;
- Rekomendasi PBB tentang pergantian tahun dasar, yang harus dilakukan setiap 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun⁴;
- Adanya pembaharuan konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, sumber data, dan metodologi penghitungan sesuai rekomendasi SNA2008;
- Tersedianya data dasar untuk meningkatkan kualitas PDRB seperti hasil Sensus Penduduk 2010 dan Indeks Harga Produsen (*Producers Price Index*);
- Tersedianya kerangka SUT Indonesia tahun 2010, yang menunjukkan keseimbangan antara produksi, konsumsi serta pendapatan yang tercipta dari aktivitas tersebut.

Implementasi SNA 2008 dalam PDRB tahun dasar 2010

Terdapat 118 revisi di SNA 2008 dari SNA sebelumnya, dan 44 diantaranya merupakan revisi yang utama. Beberapa revisi yang diadopsi dalam penghitungan PDB/PDRB tahun dasar 2010 antara lain adalah:

- Konsep dan Cakupan
 - a. Sumber daya hayati (*cultivated biological resources/CBR*). CBR merupakan nilai aset alam hasil budidaya manusia, yang diperlakukan sebagai bagian dari output pertanian dan PMTB. Contoh nilai tegakan padi, kelapa sawit dan karet yang belum dipanen, serta nilai sapi perah yang belum menghasilkan.
 - b. Sistem persenjataan (*military weapon systems/MWS*). MWS merupakan nilai pengeluaran pemerintah untuk pengadaan alat pertahanan dan keamanan, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri peralatan militer dan PMTB seperti pesawat tempur, kendaraan lapis baja, dan peluru kendali.

⁴SNA1993, para 16.76: "constant price series should not be allowed to run for more than five, or at the most, ten years without rebasing"

- c. Penelitian dan pengembangan (*research and development/RnD*). *RnD* merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas penelitian dan pengembangan, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB seperti *RnD* tentang varietas padi, produk otomotif, dan riset pemasaran.
 - d. Eksplorasi dan evaluasi mineral (*mineral exploration and evaluation/MEE*). *MEE* merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah berhasil atau tidak menemukan cadangan tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.
 - e. Bank Sentral (*Central Bank/CB*). Aktivitas Bank Indonesia yang terkait dengan penyediaan jasa kebijakan moneter dan pengawasan dipisahkan dari jasa intermediasi keuangan. Aktivitas tersebut digabungkan dengan aktivitas penyediaan jasa regulasi yang dihasilkan pemerintahan.
 - f. Komputer software (*computer software and databases/CSD*). *CSD* merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunan *databases*, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.
 - g. Produk kekayaan intelektual (*entertainment, literary or artistic originals/ELA*). *ELA* merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunannya, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.
 - h. Pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah kegiatan tersebut berhasil ataupun tidak berhasil menemukan cadangan tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.
- Metodologi
Output jasa intermediasi keuangan. Output industri ini diestimasi dengan metoda FISIM (*Financial intermediation services indirectly measured / FISIM*). FISIM dihitung berdasarkan tingkat suku bunga simpanan (*deposits*), bunga pinjaman (*loans*), dan suku bunga referensi (*reference*). Metoda ini menggantikan metoda *Imputed Bank Services Charge (IBSC)*.
 - Valuasi

Nilai tambah bruto lapangan usaha dinilai dengan harga dasar (*Basic Price*). Harga dasar merupakan harga keekonomian suatu barang atau jasa pada tingkat produsen, sebelum ada intervensi pemerintah dalam bentuk pajak dan subsidi atas produk.

- **Klasifikasi**

Klasifikasi yang digunakan adalah *Internasional Standard Industrial Classification* (ISIC rev.4) dan *Central Product Classification* (CPC rev.2). BPS mengadopsi kedua jenis klasifikasi tersebut menjadi KBLI 2009 dan KBKI 2010.

Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2000 dan 2010

PDRB Tahun Dasar 2000	PDRB Tahun Dasar 2010
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT
3. Pembentukan Modal Tetap Bruto	3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
4. Perubahan Inventori	4. Pembentukan Modal Tetap Bruto
5. Ekspor	5. Perubahan Inventori
6. Impor	6. Ekspor
	7. Impor



Bab II

METODA ESTIMASI DAN SUMBER DATA

<https://magetan.kab.bps.go.id>

2.1 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA (PK-RT)

i. Pendahuluan

Komponen konsumsi rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran⁵. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumahtangga juga berperan sebagai produsen dan penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lain.

ii. Konsep dan definisi

Pengeluaran konsumsi rumah tangga (PKRT) adalah pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, dapat memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama, utamanya kelompok makanan dan perumahan.

iii. Cakupan

PKRT mencakup seluruh pengeluaran atas barang dan jasa oleh residen suatu wilayah, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu *region*. Jenis-jenis barang dan jasa yang dikonsumsi diklasifikasikan menurut COICOP (*Classifications of Individual Consumption by Purpose*) seperti yang direkomendasikan oleh UN (United Nations), sbb:

1. Makanan dan minuman tidak beralkohol
2. Minuman beralkohol, tembakau dan narkotik
3. Pakaian dan alas kaki
4. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya
5. Furniture, perlengkapan rumahtangga dan pemeliharaan rutin
6. Kesehatan
7. Angkutan
8. Komunikasi
9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan

⁵ Untuk Kabupaten/Kota yang mempunyai hasil tambang/industry/perkebunan dan nilai eksportnya sangat tinggi, umumnya nilai konsumsi rumah tangganya relatif rendah

10. Pendidikan
11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel
12. Barang dan jasa lainnya

Namun dalam publikasi ini, PK-RT hanya diklasifikasi ke dalam 7 COICOP, yaitu:

1. Makanan, Minuman, dan Rokok
2. Pakaian dan Alas Kaki
3. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga
4. Kesehatan dan Pendidikan
5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya
6. Hotel dan Restoran
7. Lainnya

iv. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi komponen PK-RT bersumber dari :

- Survei Sosial Ekonomi Nasional/Daerah (Susenas/Suseda), BPS
- Survei Khusus Konsumsi Rumah tangga Triwulanan (SKKRT), BPS
- Sensus Penduduk 2010, BPS
- Data Sekunder (dari dalam maupun luar BPS)
- Indeks Harga Konsumen (IHK), BPS

v. Metoda Estimasi

Komponen PK-RT Tahunan diestimasi dengan metoda sbb:

1. Nilai pengeluaran konsumsi perkapita Susenas/Suseda (untuk PK-RT Tahunan)
2. Data poin 1 dikalikan dengan penduduk pertengahan tahun, dikalikan 12 (PKRT Tahunan)
3. Data poin 2 dikelompokkan menjadi 12 kelompok COICOP, dengan beberapa komoditas dikontrol secara tersendiri;
4. Terhadap data poin 3, dilakukan kontrol/koreksi dengan menggunakan data sekunder atau data/indikator suplai;
5. Diperoleh nilai PK-RT Tahunan atas dasar harga berlaku (atas dasar harga Berlaku) ;
6. Susun Indeks implisit PK-RT berdasarkan IHK Kota (provinsi/kota terdekat);
7. Nilai PK-RT atas dasar harga Konstan diperoleh dengan cara membagi hasil poin 5 dengan poin 6.

Catatan:

Komponen PK-RT Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan konsumsi rumahtangga triwulanan yang diperoleh dari hasil kegiatan SKKRT.

2.2 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LNPRT (PK-LNPRT)

i Pendahuluan

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumahtangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri di dalam perekonomian suatu wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggota maupun bagi kelompok rumahtangga tertentu secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga yang ditawarkan di bawah tingkat harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

ii Konsep dan definisi

LNPRT merupakan bagian dari lembaga non profit (LNP). Untuk diketahui, sesuai dengan fungsinya LNP dapat dibedakan atas LNP yang melayani rumahtangga (LNPRT) dan LNP yang melayani bukan rumahtangga.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggotanya atau rumahtangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota dari lembaga yang dimaksud disini adalah yang bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 jenis lembaga, yaitu : Organisasi kemasyarakatan, Organisasi sosial, Organisasi profesi, Perkumpulan sosial/ kebudayaan /olahraga/ hobi, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga keagamaan, dan Organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

iii. Cakupan

Nilai PK-LNPRT sama dengan nilai output non-pasar yang dihasilkan LNPRT. Nilai output non pasar tersebut dihitung berdasarkan nilai seluruh pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasionalnya. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari :

- a. Konsumsi antara, contoh : pembelian alat tulis, barang cetakan, pembayaran listrik, air, telepon, teleks, faksimili, biaya rapat, seminar, perjamuan, transportasi,

bahan bakar, perjalanan dinas, belanja barang dan jasa lain, sewa gedung, sewa perlengkapan kantor dll.

- b. Kompensasi tenaga kerja, contoh : upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lainnya
- c. Penyusutan
- d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN dll.

iv. Sumber data

- a. Survei Khusus Lembaga Nonprofit yang melayani Rumahtangga (SK-LNP), BPS
- b. SK-LNP Triwulanan (SK-LNPT), BPS
- c. Hasil up-dating direktori LNPRT, BPS
- d. Indeks Harga Konsumen, BPS

v. Metode Estimasi

Komponen PK-LNPRT Tahunan diestimasi dengan metoda sbb:

1. Nilai pengeluaran konsumsi per jenis lembaga dari hasil SK-LNP;
2. Hasil dari poin 1 dikalikan dengan banyaknya lembaga pada pertengahan tahun dari Direktori LNPRT;
3. Terhadap hasil poin 2 dilakukan kontrol/koreksi dengan menggunakan indikator kegiatan hasil SK-LNP seperti jumlah tenaga kerja, penerima layanan, berbagai even seperti munas, rakerda, dan penanganan bencana;
4. Diperoleh nilai PK-LNPRT tahunan atas dasar harga berlaku (atas dasar harga Berlaku);
5. Susun Indeks implisit PK-LNPRT berdasarkan IHK Kota (Provinsi/Kota terdekat);
6. Nilai PK-LNPRT atas dasar harga Konstan (ADHK) diperoleh dengan membagi hasil poin 4 dengan poin 5.

Catatan :

Komponen PK-LNPRT Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan pengeluaran konsumsi LNPRT triwulanan yang diperoleh dari hasil kegiatan SK-LNPT

2.3 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH (PK-P)

i. Pendahuluan

Unit pemerintah adalah unit institusi yang dibentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang lembaga legislatif, yudikatif maupun eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas suatu wilayah. Pemerintah juga mempunyai berbagai peran dan fungsi lainnya, seperti sebagai penyedia barang dan jasa bagi kelompok atau individu rumah tangga, sebagai pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lainnya, berfungsi mendistribusikan pendapatan atau kesejahteraan melalui aktivitas transfer, serta terlibat di dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah bisa berperan sebagai konsumen maupun produsen, serta sebagai regulator yang menetapkan berbagai kebijakan di bidang fiskal dan moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi atas barang dan jasa akhir. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah akan melakukan aktivitas memproduksi barang & jasa maupun aktivitas investasi.

ii. Konsep dan Definisi

Nilai PK-P merupakan besarnya nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh pemerintah untuk dikonsumsi oleh pemerintah itu sendiri. Nilai tersebut diestimasi dengan pendekatan pengeluaran, yakni sebesar nilai pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran kompensasi pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, serta nilai output dari unit Bank Indonesia. Nilai ini masih harus dikurangi nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan melalui unit produksi yang tak terpisahkan dari aktivitas pemerintahan secara keseluruhan. Aktivitas yang dimaksud mencakup aktivitas :

1. Memproduksi barang yang sejenis dengan barang yang diproduksi unit perusahaan seperti publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, dan pembibitan tanaman di kebun percobaan. Aktivitas menghasilkan barang-barang semacam itu bersifat insidental dan di luar fungsi utama dari unit pemerintah.
2. Memproduksi jasa, seperti penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam praktek, pemerintah akan memungut biaya, namun umumnya biaya yang dikenakan tidak akan melebihi seluruh biaya yang

dikeluarkan pemerintah. Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi atau pendapatan jasa.

iii. Cakupan

Sektor pemerintah terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, pemerintah kabupaten/kota mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing.

PK-P kabupaten/kota mencakup: a). PK-P desa/kelurahan/nagari yang ada di wilayah kabupaten/kota; b). PK-P kabupaten/kota yang bersangkutan; c). PK-P pusat yang merupakan bagian dari PK-P kabupaten/kota.

iv. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk menghitung PK-P Kabupaten Tahunan adalah:

- a. Data realisasi APBD Tahunan, Kementerian Keuangan dan Bappeda
- b. Statistik Keuangan Daerah, BPS
- c. Output Bank Indonesia, Bank Indonesia
- d. Gaji Pegawai Negeri Sipil, Kementerian Keuangan dan Bappeda
- e. Indeks Harga dan Indeks Upah, BPS
- f. Indeks perkembangan pengeluaran pemerintah daerah triwulanan, BPS BPS.

v. Metode Penghitungan

Komponen PK-P kabupaten/kota Tahunan diestimasi dengan menggunakan metoda

$$\text{PK-P Kabupaten adh Berlaku} = \boxed{\text{Output non pasar-penjualan barangdan jasa} + \text{output Bank Indonesia}}$$

Output non pasar dihitung melalui pendekatan biaya operasional, seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja bantuan sosial dan belanja lain-lain.

Catatan :

1. Komponen PK-P Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan pengeluaran konsumsi pemerintah daerah triwulanan

PK-P atas dasar harga Konstan diestimasi dengan men-*deflate* PK-P atas dasar harga Berlaku dengan menggunakan deflator berikut :

Jenis Belanja	Deflator	Keterangan
Belanja Pegawai	Indeks Upah	Sama dengan Nasional
Belanja Barang	IHPB umum tanpa ekspor	Sama dengan Nasional
Penyusutan	Indeks Implisit PMTB	
Belanja Bansos	IHPB umum tanpa ekspor	Sama dengan Nasional
Penerimaan barang dan jasa	IHK umum	Prov atau Kab/Kota terdekat
Social Transfer in kind	IHK umum	Prov atau Kab/Kota terdekat
Output BI		Neraca Jasa

2.4 PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)

i Pendahuluan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor penentu di dalam perkembangan atau pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Dalam konteks PDRB, aktivitas investas yang dimaksud adalah investasi dalam bentuk fisik. Aktivitas investasi akan tercermin melalui komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori (PI). Komponen PMTB terkait dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang terlibat dalam proses produksi. Aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal, yakni dalam bentuk bangunan dan konstruksi lainnya; mesin dan perlengkapan; kendaraan; tumbuhan dan ternak; serta barang modal lainnya.

ii Konsep dan definisi

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi, dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal), dan pertumbuhan aset sumberdaya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, dan sewa

beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta akan mengalami penyusutan sepanjang usia pakai-nya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya masih mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal yang digunakan dalam proses produksi secara normal selama satu periode.

iii Cakupan

PMTB mencakup :

1. Penambahan dikurangi pengurangan aset (harta) baik barang baru maupun barang bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan lainnya, mesin & perlengkapan, alat transportasi, aset tumbuhan dan hewan yang dibudidayakan (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*), dan sebagainya;
2. Biaya alih kepemilikan aset non-finansial yang tidak diproduksi, seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
3. Perbaikan besar aset, yang bertujuan meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakainya (seperti overall mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi).

iv Sumber data

- a. Output industri konstruksi, BPS
- b. Nilai impor 2 digit HS, BPS
- c. Indeks Produksi Industri Besar Sedang, BPS
- d. Laporan Keuangan Perusahaan, Data Sekunder dari luar BPS
- e. Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang, BPS
- f. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB), BPS
- g. Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian (migas dan non-migas), BPS
- h. Publikasi Statistik Listrik, Gas & Air Minum, BPS
- i. Publikasi Statistik Konstruksi, BPS
- j. Data Eksplorasi Mineral, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- k. Statistik Peternakan, Ditjen Peternakan Kementerian Pertanian.

v. Metoda Estimasi

Penghitungan PMTB dapat dilakukan melalui metode langsung maupun tidak langsung, tergantung pada ketersediaan data yang diperoleh di wilayah masing-masing. Pendekatan “langsung” adalah dengan cara menghitung pembentukan modal (harta tetap) yang dilakukan oleh berbagai sektor ekonomi (produsen) secara langsung. Sedangkan pendekatan “tidak langsung” adalah dengan menghitung berdasarkan alokasi dari total penyediaan produk (barang dan jasa) yang menjadi barang modal di berbagai industri, atau disebut sebagai pendekatan “*arus komoditas*”. Dalam hal ini penyediaan atau “*supply*” dari barang modal dapat berasal dari produksi dalam negeri (domestik) maupun dari produk luar negeri (impor).

Pendekatan Langsung

Komponen PMTB diestimasi dengan menggunakan metoda langsung ataupun metoda tidak langsung tergantung ketersediaan data di masing-masing daerah.

✓ Metoda Langsung:

PMTB atas dasar harga Berlaku (Domestik) = Barang Modal Domestik + TTM + Pajak atas Produk (PPN) + Biaya Instalasi

PMTB atas dasar harga Berlaku (Impor) = Barang Modal Impor + TTM + Bea Impor + Biaya Instalasi

PMTB atas dasar harga Konstan diperoleh dengan cara *men-deflate* PMTB atas dasar harga Berlaku dengan IHPB sbb:

$$PMTB_{ADHK} = \frac{PMTB_{ADHB}}{IHPB}$$

IHPB yang digunakan adalah IHPB Nasional (2010=100) sesuai jenis barang modal.

✓ Metoda Tidak Langsung:

Pendekatan Supply : PMTB atas dasar harga Berlaku = Total Supply Barang x Rasio PMTB

Pendekatan Ekstrapolasi : $PMTB \text{ atas dasar harga Konstan } (t) = PMTB \text{ atas dasar harga } (t-1) \times \text{Indeks Produksi } (t)$

2.5 PERUBAHAN INVENTORI (PI)

i Pendahuluan

Dalam suatu perekonomian, inventori atau persediaan merupakan salah satu komponen penting yang dibutuhkan untuk kelangsungan suatu proses produksi, di samping tenaga kerja dan barang modal. Komponen tersebut menjadi bagian dari pembentukan modal bruto atau investasi fisik, yang terjadi di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Komponen inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong. Ketersediaan data tentang perubahan inventori pada suatu periode akuntansi menjadi penting guna memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi..

ii Konsep dan definisi

Pengertian sederhana dari inventori (persediaan) adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang dalam bentuk lain, yang punya nilai ekonomi maupun nilai manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian ini adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh pihak produsen.

Perubahan inventori adalah selisih antara nilai inventori pada akhir periode akuntansi dengan nilai inventori pada awal periode akuntansi. Perubahan inventori menjelaskan tentang perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna penambahan (tanda positif) atau pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan proses produksi, sehingga perlu pencadangan baik dalam bentuk bahan baku atau bahan penolong. Ketidakpastian yang disebabkan pengaruh eksternal juga menjadi faktor pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih dipengaruhi oleh unsur spekulatif dengan harapan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar.

Sedangkan bagi pemerintah, kebijakan pencadangan khususnya komoditas strategis utamanya ditujukan untuk menjaga stabilitas ekonomi, politik dan sosial. Karena

menyangkut kepentingan masyarakat luas (publik), maka perlu ada pencadangan untuk beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, terigu, minyak goreng dan gula pasir. Bagi rumah tangga pengadaan inventori lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsinya saja.

iii Cakupan

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang adalah sbb :

- a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
- b. Berbagai jenis bahan baku & penolong (*material & supplies*), yaitu semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
- c. Barang jadi, yaitu barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan, termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
- d. Barang setengah jadi, yaitu barang-barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai).
- e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang besar maupun pedagang eceran untuk tujuan dijual;
- f. Ternak untuk tujuan dipotong;
- g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau dipakai sebagai bahan bakar atau persediaan; dan
- h. Persediaan pada pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

iv Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk penghitungan komponen perubahan inventori adalah :

- Laporan keuangan perusahaan hasil kegiatan survei atau *website* Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id);

- Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD, Data Sekunder dari luar BPS
- Data komoditas pertambangan, Statistik Pertambangan dan Penggalian BPS;
- Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang, BPS;
- Data komoditas perkebunan;
- Indeks harga implisit PDRB industri terpilih;
- Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih;
- Data persediaan beras, Bulog; data semen, Asosiasi Semen Indonesia; data gula, Dewan Gula Indonesia ; dan data ternak, Ditjennak Kementan..

v. **Metoda Estimasi**

Komponen Perubahan Inventori (PI) diestimasi dengan menggunakan metoda revaluasi atau metoda deflasi, tergantung jenis komoditasnya.

a. Metoda Revaluasi

Metoda ini digunakan untuk komoditas pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan pertambangan.

PI atas dasar harga Berlaku = $\frac{\text{Volume inventori (t)} - \text{Volume inventori (t-1)}}{\text{Harga per unit}}$

PI atas dasar harga Konstan = $\text{PI atas dasar harga Berlaku} / \text{IHPB}$

b. Metoda Deflasi

Metoda ini digunakan untuk komoditas industri pengolahan dan komoditas lainnya.

PI atas dasar harga Konstan = $\frac{\text{Inventori (t) atas dasar harga Berlaku/IHPB (t)} - \text{Inventori (t-1) atas dasar harga Berlaku/IHPB (t-1)}}{\text{IHPB rata-rata (t)}}$

PI atas dasar harga Berlaku = $\text{PI atas dasar harga Konstan} \times \text{IHPB rata-rata (t)}$

2.6 EKSPOR - IMPOR

i Pendahuluan

Aktivitas ekspor-impor dalam suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintah. Ragam barang dan jasa yang diproduksi serta disparitas harga, menjadi faktor utama munculnya aktivitas ekspor impor. Daerah yang tidak dapat memenuhi kebutuhan-nya sendiri berusaha mendatangkan dari daerah atau bahkan negara lain. Di sisi lain, daerah yang memproduksi barang dan jasa melebihi dari kebutuhan domestik, terdorong untuk memperluas pasar ke luar daerah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan jaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas barang dan jasa semakin meningkat dan beragam. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus distribusi barang dan jasa. Kondisi tersebut semakin mendorong aktivitas ekspor-impor disuatu wilayah menjadi semakin berkembang.

ii Konsep dan definisi

Ekspor-impor di suatu wilayah didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (baik penjualan/pembelian, barter, hadiah ataupun hibah) atas barang dan jasa antara residen wilayah tersebut dengan non-residen yang berada di luar wilayah tersebut.

iii Cakupan

Ekspor-Import ke dan dari suatu wilayah kabupaten/kota terdiri dari:

- a. Ekspor ke luar provinsi/kabupaten/kota
- b. Impor dari luar provinsi/kabupaten/kota.

Selisih antara ekspor dan impor didefinisikan sebagai Net Ekspor.

iv. Sumber data

Nilai ekspor-impor wilayah kabupaten/kota didasarkan pada penghitungan Net Ekspor. Namun sering kali untuk mengestimasi tidak ada data yang sesuai dengan konsep dan definisi yang ditentukan. Kondisi inilah yang menyebabkan Net Ekspor kabupaten/kota diperlakukan sebagai item penyeimbang (*residual*), yakni perbedaan antara

PDRB menurut pengeluaran dengan PDRB menurut lapangan usaha. Selanjutnya dilakukan pemisahan Net Ekspor menjadi ekspor dan impor dengan menggunakan metoda tidak langsung.

<https://magetankab.bps.go.id>



Bab III

TINJAUAN PEREKONOMIAN
KABUPATEN MAGETAN
MENURUT PDRB PENGELUARAN
KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2016 -2020

3.1 PERKEMBANGAN PDRB PENGELUARAN

Sebagaimana diketahui bahwa sejak tahun 2015, PDRB diestimasi dengan menggunakan tahun dasar yang baru, tahun 2100 (2010=100) menggantikan tahun dasar lama, tahun 2000 (2000=100). Penyusunan PDRB dengan tahun dasar baru juga disertai dengan upaya untuk mengimplementasikan *System of National Accounts (SNA)* yang baru, SNA 2008. Ke dua hal tersebut tentu berdampak pada besaran maupun struktur PDRB serta indikator ekonomi yang diturunkan dari data PDB/PDRB tersebut.

Perubahan struktur ekonomi Kabupaten Magetan akibat proses pembangunan ekonomi yang terjadi pada periode 2016 s.d 2020, tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal lebih dipengaruhi oleh perkembangan maupun perubahan perilaku masing-masing komponen pengeluaran akhir. Sedangkan faktor eksternal banyak dipengaruhi oleh perubahan teknologi dan struktur perdagangan nasional dan global sebagai akibat peningkatan perdagangan internasional.

Data yang ada menunjukkan bahwa setiap komponen pengeluaran mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia di wilayah domestik Magetan digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (Rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah). Sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik (dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori). Untuk lebih jelasnya, perilaku masing-masing komponen pengeluaran itu akan diuraikan pada bagian berikut.

Setelah berlalunya masa krisis yang melanda ekonomi nasional dan dunia sejak tahun 2008, kondisi perekonomian Kabupaten Magetan menunjukkan tanda pemulihan. Hal ini terlihat dari PDRB yang terus meningkat dan pertumbuhan ekonomi yang terus menunjukkan arah positif. Peningkatan ekonomi tersebut digambarkan melalui nilai PDRB ADHB dan ADHK, serta pertumbuhan pada total PDRB. Secara umum, dari tahun 2016 hingga tahun 2020 terjadi peningkatan ekonomi di Kabupaten Magetan. Namun, pada tahun 2020 merebaknya pandemi covid-19 membuat perekonomian di Kabupaten Magetan menurun.

**Tabel 1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Pengeluaran, Kabupaten Magetan
Tahun 2016-2020**

(Juta Rp)

Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	10.856.507,82	11,658,535.90	12,658,899.78	13,572,038.23	13,579,285.13
2. Konsumsi LNPRT	185,373.10	195,515.43	213,058.03	228,944.56	235,006.43
3. Konsumsi Pemerintah	1,621,471.90	1,748,761.62	1,933,187.23	2,095,753.02	2,053,325.53
4. PMTB	3,363,067.35	3,695,450.07	4,047,632.26	4,405,327.91	4,227,912.04
5. Perubahan Inventori	71,362.96	71,930.45	78,739.88	80,210.51	39,420.30
6. Ekspor	4,729,093.68	5,403,889.69	6,144,301.00	6,276,283.81	6,147,058.66
7. Impor	5,630,460.30	6,480,713.95	7,451,893.63	7,808,325.36	7,510,245.44
Total PDRB	15,196,416.51	16,293,369.22	17,623,924.55	18,850,232.70	18,771,762.65

Nilai PDRB Kabupaten Magetan adh berlaku selama periode tahun 2016 s.d 2019 menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Peningkatan nilai tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan harga dan juga perubahan volume. Namun, pada tahun 2020, nilai PDRB sedikit berkontraksi sebagai akibat pandemi covid-19.

**Tabel 2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Pengeluaran, Kabupaten Magetan
Tahun 2016-2020**

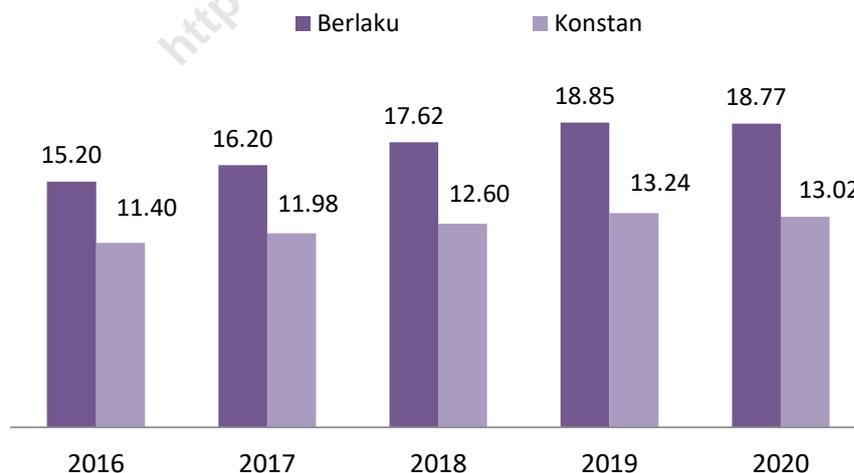
(Juta Rp)

Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	8,331,676.30	8,731,563.60	9,172,090.77	9,602,420.81	9,505,232.20
2. Konsumsi LNPRT	124,895.63	126,563.78	132,550.25	138,199.20	138,421.60
3. Konsumsi Pemerintah	1,108,679.93	1,149,565.29	1,215,547.85	1,280,190.43	1,231,265.07
4. PMTB	2,528,339.52	2,676,346.21	2,840,277.83	2,997,921.85	2,839,431.13
5. Perubahan Inventori	44,040.75	44,312.96	44,490.44	44,663.92	21,573.86
6. Ekspor	3,589,104.74	3,840,242.06	4,091,359.55	4,217,707.44	4,107,717.70
7. Impor	4,328,605.43	4,590,535.83	4,893,716.44	5,043,630.86	4,822,750.85
Total PDRB	11,398,131.44	11,978,058.06	12,602,600.24	13,237,472.80	13,020,890.72

PDRB menurut pengeluaran selain dinilai atas dasar harga berlaku juga dinilai adh konstan 2010 atau adh berbagai produk yang dinilai dengan harga pada tahun 2010. Melalui pendekatan penghitungan adh konstan, PDRB di masing-masing tahun dapat memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau secara kuantitas saja (tanpa ada pengaruh perubahan harga). PDRB komponen pengeluaran adh konstan menggambarkan perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya berkaitan dengan peningkatan volume konsumsi akhir. Selama kurun waktu 2016–2020, gambaran tentang perkembangan ekonomi Kabupaten Magetan berdasarkan PDRB adh Konstan dapat dilihat pada tabel 2 diatas. Sama halnya dengan PDRB adh Berlaku, seluruh komponen pengeluaran akhir PDRB adh Konstan juga menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Hanya pada tahun 2020, nilai PDRB mengalami penurunan dikarenakan pandemic covid-19.

Dari grafik di bawah, nampak bahwa pada umumnya nilai PDRB adh Berlaku selalu lebih besar dari nilai PDRB adh Konstan. Perbedaan tersebut disebabkan karena ada pengaruh perubahan harga dalam perhitungan PDRB adh Berlaku. Dalam PDRB adh Konstan pengaruh faktor harga telah ditiadakan.

Grafik 1
Perbandingan PDRB adh Berlaku dan adh Konstan 2010
Menurut Pengeluaran, Kabupaten Magetan Tahun 2016-2020
(triliun rupiah)



Terbentuknya keseluruhan PDRB atau total PDRB merupakan kontribusi dari semua komponen pengeluarannya, yang terdiri dari konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT), konsumsi akhir LNPRT (PK-LNPRT), konsumsi akhir pemerintah (PK-P), pembentukan modal tetap bruto (PMTB), ekspor dan impor.

**Tabel 3. Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran,
Kabupaten Magetan Tahun 2016 - 2020**

<i>(persen)</i>					
Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	71.44	71.55	71.83	72.00	72.34
2. Konsumsi LNPRT	1.22	1.20	1.21	1.21	1.25
3. Konsumsi Pemerintah	10.67	10.73	10.97	11.12	10.94
4. PMTB	22.13	22.68	22.97	23.37	22.52
5. Perubahan Inventori	0.47	0.44	0.45	0.43	0.21
6. Ekspor	31.12	33.17	34.86	33.30	32.75
7. Impor	37.05	39.78	42.28	41.42	40.01
Total PDRB	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Pertumbuhan riil PDRB atau lebih dikenal dengan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) merupakan agregat makro lain yang dapat diturunkan dari data PDRB, yang menggambarkan kinerja pembangunan di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magetan dari tahun 2016 s.d 2019 setiap tahunnya selalu mencapai 5 persen, dengan masing-masing pertumbuhan sebesar 5,31 persen (2016); 5,09 persen (2017); 5,21 persen (2018); dan 5,04 persen (2019). Namun sayangnya pada tahun 2020 pertumbuhan pertumbuhan ekonomi terkontraksi hingga minus 1,64 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 5,31 persen, sebaliknya pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2020 yang terkontraksi sedalam 1,64 persen. Kontraksi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 disebabkan oleh menurunnya kinerja ekonomi sebagai dampak merebaknya wabah covid-19.

**Tabel 4. Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran,
Kabupaten Magetan Tahun 2016 – 2020**

<i>(Persen)</i>					
Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	4.74	4.80	5.05	4.69	-1.01
2. Konsumsi LNPRT	3.33	1.34	4.73	4.26	0.16
3. Konsumsi Pemerintah	-7.76	3.69	5.74	5.32	-3.82
4. PMTB	5.75	5.85	6.13	5.55	-5.29
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Ekspor	-	-	-	-	-
7. Impor	-	-	-	-	-
Total PDRB	5.31	5.09	5.21	5.04	-1.64

Sementara itu, indeks implisit¹ PDRB menggambarkan tingkat perubahan harga yang terjadi pada sisi konsumen, baik konsumen akhir (rumah tangga, LNPRT, dan pemerintahan) maupun konsumen lainnya (perusahaan dan luar negeri). Secara umum, indeks implisit PDRB Kabupaten Magetan dari tahun 2016 hingga tahun 2020 menunjukkan peningkatan.

Tabel 5. Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Magetan, Tahun 2016- 2020

(Persen)

Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	130.30	133.52	138.02	141.34	142.86
2. Konsumsi LNPRT	148.42	154.48	160.74	165.66	169.78
3. Konsumsi Pemerintah	146.25	152.12	159.04	163.71	166.77
4. PMTB	133.01	138.08	142.51	146.95	148.90
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Ekspor	-	-	-	-	-
7. Impor	-	-	-	-	-
Total PDRB	133.32	136.03	139.84	142.40	144.17

3.2 PERKEMBANGAN KOMPONEN PDRB PENGELUARAN

Perubahan struktur perekonomian suatu wilayah sebagai akibat dari upaya pembangunan ekonomi yang dilaksanakan pada periode tertentu, tidak terlepas dari perilaku masing-masing komponen pengguna akhir. Setiap komponen mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuan akhir penggunaan barang dan jasa. Data empiris menunjukkan bahwa sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia pada periode tertentu digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir oleh rumah tangga, LNPRT dan pemerintah, sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori. Berikut perilaku masing-masing komponen PDRB pengeluaran Kabupaten Magetan untuk periode 2016 - 2020.

3.2.1. Konsumsi Akhir Rumah Tangga

Komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah tangga (PK-RT) merupakan pengeluaran terbesar atas berbagai barang dan jasa yang tersedia. Data berikut menunjukkan bahwa dari seluruh nilai tambah bruto (PDRB) yang diciptakan di Kabupaten

¹ Indeks perkembangan

Magetan, ternyata sebagian besar masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumahtangga. Dengan kata lain, sebagian besar produk (domestik) yang dihasilkan di wilayah Kabupaten Magetan maupun produk (impor) yang didatangkan dari luar wilayah atau luar negeri akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir oleh rumahtangga.

Dalam suatu perekonomian, fungsi utama dari institusi rumahtangga adalah sebagai konsumen akhir (*final consumer*) atas barang dan jasa yang tersedia, termasuk konsumsi oleh rumahtangga khusus (seperti penjara, asrama dan lain-lain). Selanjutnya, berbagai jenis barang dan jasa yang dikonsumsi tersebut akan diklasifikasikan menurut 7 (tujuh) kelompok COICOP (*Classification of Individual Consumption by Purpose*), yaitu kelompok makanan dan minuman selain restoran; pakaian, alas kaki dan jasa perawatannya; perumahan dan perlengkapan rumah tangga; kesehatan dan pendidikan; angkutan dan komunikasi; restoran dan hotel; serta kelompok barang dan jasa lainnya.

Tabel 6. Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Magetan, Tahun 2016 – 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga					
a. ADHB (<i>Juta Rp</i>)	10.856.507,82	11.658.535,90	12.658.899,78	13.572.038,23	13.579.285,13
b. ADHK 2010 (<i>Juta Rp</i>)	8.331.676,30	8.731.563,60	9.172.090,77	9.602.420,81	9.505.232,20
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	71,44	71,55	71,83	72,00	72,34
Rata-rata konsumsi per-Rumah Tangga/tahun (<i>Ribu Rp</i>)					
a. ADHB	61.871,02	66.375,19	72.057,81	77.178,47	77.292,05
b. ADHK 2010	47.482,06	49.711,14	52.209,97	54.637,13	54.102,91
Rata-rata konsumsi per- kapita/tahun (<i>Ribu Rp</i>)					
a. ADHB	17.287,87	18.546,56	20.127,87	21.565,24	21.588,00
b. ADHK 2010	13.267,34	13.890,29	14.583,78	15.266,73	15.111,18
Pertumbuhan ²					
a. Total konsumsi RT	4,74	4,80	5,15	4,69	-1,01
b. Per-Rumah Tangga	4,64	4,69	5,13	4,68	-0,98
c. Per kapita	4,64	4,70	5,10	4,65	1,02
Jumlah Rumah Tangga (<i>unit</i>)	175.470	175.646	175.677	175.749	175.688
Jumlah penduduk (<i>jiwa</i>)	627.984	628.609	628.924	628.977	629.020

Data di atas menunjukkan bahwa pada periode tahun 2016–2020 pengeluaran konsumsi akhir rumahtangga mengalami peningkatan signifikan, baik dari sisi nominal (atas dasar harga berlaku) maupun secara riil (atas dasar harga konstan). Kenaikan jumlah

² Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan/ADHK 2010)

penduduk menjadi salah satu pendorong terjadinya kenaikan nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga. Pada gilirannya kenaikan tersebut juga akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Dalam kurun waktu 2016 - 2020 konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan signifikan baik dalam nominal maupun riil, sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk maupun jumlah rumah tangga. Kenaikan jumlah penduduk mendorong terjadinya kenaikan nilai konsumsi rumah tangga, yang pada gilirannya akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Porsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap PDRB pada periode tahun 2016 s.d 2020 cukup berfluktuatif. Titik tertinggi terjadi pada tahun 2020 yaitu 72,34 persen dan titik terendah terjadi pada tahun 2016 yaitu 71,44 persen. Hal ini menunjukkan bahwa peranan konsumsi rumah tangga semakin dominan dalam pembentukan nilai PDRB di Kabupaten Magetan.

Masa pemulihan ekonomi telah mendorong rumah tangga untuk memperbaiki serta mengembalikan perilaku dan kebiasaan konsumsinya setelah sekian lama mengalami masa-masa krisis. Melimpahnya penawaran dan persediaan berbagai jenis barang dan jasa di pasar domestik (termasuk yang berasal dari impor) turut menjadi pemicu meningkatnya belanja untuk konsumsi, termasuk konsumsi rumah tangga.

Secara rata-rata, konsumsi per rumah tangga terus meningkat dari tahun ke tahun, baik menurut atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Pada tahun 2016, secara umum setiap rumah tangga di Kabupaten Magetan menghabiskan dana sekitar 61.871,02 ribu rupiah setahun untuk membiayai konsumsi baik dalam bentuk makanan maupun bukan makanan (sandang, perumahan, pendidikan, dsb). Pengeluaran ini terus meningkat menjadi 66.375,19 ribu rupiah (2017); sebesar 72.057,81 ribu rupiah (2018), sebesar 77.178,47 ribu rupiah (2019) dan sebesar 77.292,05 ribu rupiah (2020).

Sementara itu, pada perkiraan adh konstan 2010, rata-rata konsumsi rumah tangga per rumah tangga tumbuh pada kisaran 3 sampai 5 persen dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 5,13 persen. Dalam kondisi normal, pada rentang 2016 hingga 2019 nampak bahwa peningkatan keseluruhan konsumsi rumah tangga secara riil lebih tinggi dari peningkatana jumlah penduduk. Hal ini mengindikasikan terjadi perubahan tingkat kemakmuran masyarakat, meskipun tidak dapat dijelaskan lebih jauh melalui

perangkat data PDRB ini. Sementara itu, dalam kondisi pandemic, konsumsi rumah tangga terdampak signifikan sehingga mengalami penurunan. Hal ini turut berdampak pada penurunan konsumsi per kapita pada tahun 2020.

Pandemi covid-19 yang terjadi selama tahun 2020 berdampak pada terkontraksinya konsumsi rumah tangga pada tahun tersebut. Selama pandemic, masyarakat cenderung mengutamakan pemenuhan kebutuhan primer dan menunda konsumsi kebutuhan sekunder maupun tersier. Pengurangan konsumsi ini juga didorong oleh adanya indikasi penurunan pendapatan masyarakat sebagai akibat terhambatnya kinerja ekonomi serta ruang gerak masyarakat selama pandemi.

Secara total, pertumbuhan konsumsi rumah tangga adh konstan mengalami peningkatan dari 4,74 persen (2016) hingga menjadi sebesar 4,80 persen (2017) dan terus mengalami peningkatan menjadi 5,15 persen (2018). Namun pada tahun 2019, mengalami penurunan menjadi sebesar 4,69 persen. Namun, semenjak wabah virus covid-19 melanda Kabupaten Magetan, rata-rata konsumsi per rumah tangga mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 hingga tumbuh negatif.

Sementara itu, pertumbuhan konsumsi per kapita selaras dengan adh konstan dimana meningkat dari 4,64 persen pada tahun 2016 dan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya yaitu sebesar 4,70 persen (2017); dan sebesar 5,10 persen (2018). Namun, pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi sebesar 4,65 persen. Adanya pandemi covid-19 mengakibatkan pertumbuhan konsumsi per kapita terkontraksi hingga tumbuh negatif sebesar -1,02 persen.

Tabel 7. Struktur Komponen Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Magetan, Tahun 2016 – 2020³

Kelompok Konsumsi	(Persen)				
	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	32,41	31,95	31,64	31,42	33,00
b. Pakaian dan Alas Kaki	2,91	2,97	3,01	2,97	2,97
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah	9,70	9,66	9,54	9,42	9,86
d. Kesehatan dan Pendidikan	8,35	8,41	8,32	8,23	8,86
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	25,38	25,52	25,81	26,11	22,48
f. Hotel dan Restoran	15,86	16,04	16,19	16,34	16,77
g. Lainnya	5,40	5,45	5,50	5,51	6,06

³Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga berlaku /ADHB)

Total Konsumsi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
----------------	--------	--------	--------	--------	--------

Secara rata-rata dari tahun 2016 s.d 2020, nampak pada struktur konsumsi akhir rumah tangga di Kabupaten Magetan, bahwa konsumsi bukan makanan lebih tinggi dibandingkan konsumsi makanan. Proporsi pengeluaran untuk makanan cenderung masih berada pada kisaran yang sama. Proporsi untuk makanan pada masing-masing tahun mencapai 32,41 persen (2016); 31,95 persen (2017); 31,64 persen (2018); 31,42 persen (2019) dan 33,00 persen (2020). Sementara proporsi pengeluaran bukan makanan menunjukkan bahwa konsumsi akhir rumah tangga di Kabupaten Magetan yang tertinggi adalah sub komponen transportasi, komunikasi, rekreasi dan budaya lebih dari 20 persen dari total konsumsi akhir rumah tangga.

Pola proporsi konsumsi di atas, menunjukkan tarik menarik antara kebutuhan rumah tangga atas makanan dan non makanan yang masih cukup kuat. Meskipun demikian, pengeluaran untuk kebutuhan non-makanan menjadi semakin penting sebagai akibat dari perubahan dan pengaruh tatanan ekonomi sosial dalam masyarakat. Pengeluaran tersebut di antaranya meliputi biaya untuk pendidikan, pembelian alat dan perlengkapan elektronik, pembelian alat transportasi, jasa komunikasi, jasa transportasi, jasa kesehatan, perjalanan wisata, restoran, sewa bangunan tempat tinggal, jasa hiburan dan sebagainya.

Tabel 8. Pertumbuhan Riil Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Magetan, Tahun 2016 – 2020

Kelompok Konsumsi	(Persen)				
	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	2.78	3.32	4.26	3.91	3.84
b. Pakaian dan Alas Kaki	4.58	5.22	4.43	3.85	-1.08
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah	5.40	4.46	3.94	3.82	3.06
d. Kesehatan dan Pendidikan	5.32	4.85	4.28	4.02	6.26
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	5.96	6.26	6.88	5.89	-12.30
f. Hotel dan Restoran	5.72	5.29	4.80	5.26	0.69
g. Lainnya	5.75	5.16	4.44	4.51	7.50

Pertumbuhan “riil” menunjukkan perubahan konsumsi akhir rumah tangga dalam bentuk kuantum (volume) dari waktu ke waktu. Dilihat dari pertumbuhan “riil” nya,

pengeluaran rumah tangga untuk kelompok makanan cenderung stabil di kisaran 2 hingga 4 persen. Selama tahun 2016 hingga tahun 2020 pertumbuhan kelompok konsumsi makanan, minuman dan rokok secara berturut-turut adalah 2,78 persen (2016); 3,32 persen (2017); 4,26 persen (2018); 3,91 persen (2019); dan 3,84 persen (2020). Kelompok konsumsi makanan merupakan salah satu komponen yang tidak terlalu terdampak oleh pandemi covid-19. Pertumbuhan riil kelompok konsumsi makanan hanya tumbuh melambat dibandingkan tahun sebelumnya.

Adapun pertumbuhan riil kelompok bukan makanan cenderung lebih fluktuatif. Pandemi covid-19 memberikan dampak yang cukup signifikan pada konsumsi rumah tangga utamanya kelompok bukan makanan. Kelompok pakaian dan alas kaki serta kelompok transportasi, komunikasi, rekreasi dan budaya berkontraksi paling dalam hingga tumbuh negatif sebesar -1,08 persen dan -12,30 persen. Sementara itu, pada kelompok konsumsi perumahan, perkakas, perlengkapan dan penyelenggaraan rumah serta hote dan restoran terjadi perlambatan pertumbuhan riil bila dibandingkan tahun sebelumnya. Sebaliknya, pada kelompok kesehatan dan pendidikan serta konsumsi lainnya mengalami peningkatan pertumbuhan riil yang signifikan sejalan dengan perubahan pola kebiasaan hidup masyarakat untuk menekan penyebaran virus covid-19.

Tabel 9. Perubahan Indeks Harga Implisit Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Magetan, Tahun 2016 – 2020⁴

Kelompok Konsumsi	(Persen)				
	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	3.97	2.46	3.13	2.48	1.20
b. Pakaian dan Alas Kaki	4.84	4.19	5.41	1.84	1.16
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah	3.15	2.44	3.19	1.99	1.54
d. Kesehatan dan Pendidikan	3.01	3.19	2.95	1.97	1.41
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	1.80	1.62	2.73	2.44	-1.77
f. Hotel dan Restoran	5.14	3.15	4.59	2.75	1.98
g. Lainnya	5.16	3.16	4.79	2.93	2.36

⁴Tingkat perubahan harga produk konsumsi

Sementara itu, tingkat perubahan harga yang secara implisit disajikan dalam tabel 9, menunjukkan peningkatan setiap tahunnya untuk setiap kelompok konsumsi. Selama periode 2016 - 2020 peningkatan harga (inflasi) relatif stabil dan cenderung melambat. Demikian juga dengan kelompok bukan makanan yang cenderung melambat. Pada kelompok bukan makanan, hanya konsumsi transportasi, komunikasi, rekreasi dan budaya yang mengalami penurunan harga (deflasi) pada tahun 2020.

3.2.2. Konsumsi Akhir LNPRT

Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) adalah salah satu unit institusi yang melakukan kegiatan produksi, konsumsi dan akumulasi aset. Keberadaannya diakui oleh hukum atau masyarakat, terpisah dari orang atau entitas lain yang memiliki atau mengendalikan. Dalam kegiatannya, LNPRT merupakan mitra pemerintah dalam mengatasi berbagai masalah sosial seperti kemiskinan dan lingkungan hidup.

Tabel 10. Perkembangan Pengeluaran Akhir Konsumsi LNPRT Kabupaten Magetan, Tahun 2016 – 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi LNPRT					
a. ADHB (<i>Juta Rp</i>)	185.373,10	195.515,43	213.058,03	228.944,56	235.006,43
b. ADHK 2010 (<i>Juta Rp</i>)	124.895,63	126.563,78	132.550,25	138.199,20	138.421,60
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	1,22	1,20	1,21	1,21	1,25

Selama periode tahun 2016 - 2020 konsumsi LNPRT baik secara *adh* berlaku maupun *adh* konstan 2010 menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2016 konsumsi LNPRT *adh* berlaku sebesar 185,37 miliar rupiah kemudian meningkat menjadi 195,51 miliar rupiah (2017), 213,06 miliar rupiah (2018), 228,94 miliar rupiah (2019), dan 235,01 miliar rupiah (2020). Demikian juga dengan konsumsi LNPRT secara *adh* konstan yaitu sebesar 124,89 miliar rupiah pada tahun 2016 dan selanjutnya meningkat hingga sebesar 138,42 miliar rupiah pada tahun 2020.

Proporsi konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah tangga (LNPRT) walaupun mengalami peningkatan selama periode 2016 - 2020, namun merupakan komponen yang paling kecil kontribusinya dalam penggunaan produk domestik regional bruto yaitu pada kisaran 1 persen. Pada tahun 2019 kontribusi LNPRT terhadap PDRB sebesar 1,21 persen meningkat hingga 1,25 persen pada tahun 2020. Peningkatan ini

didorong oleh peningkatan aktifitas LNPRT salah satunya lembaga kemanusiaan selama masa pandemi covid-19 sehingga turut mendorong tingkat konsumsi LNPRT pada tahun tersebut (2020).

3.2.3. Konsumsi Akhir Pemerintah

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah terdiri dari Pengeluaran Konsumsi Individu dan Pengeluaran Konsumsi Kolektif. Barang dan jasa individu merupakan barang dan jasa privat, dimana ciri-ciri barang privat adalah a) *Scarcity*, yaitu ada kelangkaan/keterbatasan dalam jumlah. b) *Excludable consumption*, yaitu konsumsi suatu barang dapat dibatasi hanya pada mereka yang memenuhi persyaratan tertentu (biasanya harga). c) *Rivalrous competition*, yaitu konsumsi oleh satu konsumen akan mengurangi atau menghilangkan kesempatan pihak lain untuk melakukan hal serupa. Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa individu adalah jasa pelayanan kesehatan pemerintah di rumah sakit/puskesmas dan jasa pendidikan di sekolah/universitas negeri.

Sedangkan barang dan jasa kolektif ekuivalen dengan barang publik yang memiliki ciri a) *Non rivalry*, yaitu pengeluaran satu konsumen terhadap suatu barang tidak mengurangi kesempatan konsumen lain untuk juga mengkonsumsi barang tersebut. b) *Non excludable*, yaitu apabila suatu barang publik tersedia, maka tidak ada yang dapat menghalangi siapapun untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut atau dengan kata lain setiap orang memiliki akses ke barang tersebut. Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa kolektif adalah jasa pertahanan yang dilakukan TNI dan keamanan yang dilakukan kepolisian.

Konsumsi akhir pemerintah ditambah pengeluaran akhir rumah tangga dan LNPRT merupakan jumlah dari konsumsi akhir dalam suatu perekonomian suatu wilayah. Peranan konsumsi pemerintah dalam perekonomian Kabupaten Magetan serta bagaimana perkembangannya dijelaskan dalam uraian dibawah ini.

**Tabel 11. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah
Di Kabupaten Magetan, Tahun 2016 - 2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Pemerintah					
a. ADHB (<i>Juta Rp</i>)	1.621.471,90	1.748.761,62	1.933.187,23	2.095.753,02	2.053.325,53
b. ADHK 2010 (<i>Juta Rp</i>)	1.108.679,93	1.149.565,29	1.215.547,85	1.280.190,43	1.231.265,07
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	10,67	10,73	10,97	11,12	10,94
Konsumsi Pemerintah per- kapita (<i>Ribu Rp</i>)					
a. ADHB	2.582,03	2.805,82	3.073,80	3.332,00	3.264,32
b. ADHK 2010	1.765,46	1.828,74	1.932,74	2.035,35	1.957,43
Konsumsi Pemerintah per- pegawai pemerintah (<i>Ribu Rp</i>)					
a. ADHB	143.302,86	208.434,04	245.546,45	267.896,33	284.709,59
b. ADHK 2010	97.983,20	137.016,13	154.394,49	163.644,44	170.724,50
Pertumbuhan ⁵					
a. Total konsumsi pemerintah	-7,76	3,69	5,74	5,32	-3,82
b. Konsumsi per kapita	-7,85	3,58	5,69	5,31	-3,83
Jumlah penduduk (jiwa)	627.984	628.609	628.924	628.977	629.020

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah secara total menunjukkan peningkatan baik untuk adh berlaku maupun adh konstan 2010. Pada tahun 2016 sebesar 1.621.471,90 juta rupiah. Selanjutnya, pada tahun 2017 hingga 2019 pengeluaran konsumsi akhir pemerintah terus mengalami peningkatan yaitu masing-masing sebesar 1.748.761,62 juta rupiah (2017); 1.933.187,23 juta rupiah (2018), dan 2.095.753,02 juta rupiah (2019). Demikian halnya dengan konsumsi pemerintah adh Konstan 2010, yang juga mengalami peningkatan pada masing-masing tahun. Hal ini mengindikasikan, bahwa secara riil telah terjadi kenaikan pengeluaran pemerintah dari sisi kuantitas.

Kontribusi konsumsi pemerintah terhadap perekonomian Jawa Timur relatif stabil sepanjang tahun 2016 hingga 2020 dengan peranan sebesar 10-11 persen per tahun. Sepanjang periode ini, peran pemerintah cenderung meningkat dari 10,67 persen, kemudian

⁵ Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan /ADHK 2000)

terus bertambah setiap tahunnya hingga menyentuh 10,94 persen pada tahun 2020. Kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 11,12 persen. Sementara itu, kontribusi terendah terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 10,67 persen.

Dalam prakteknya, pengeluaran pemerintah seringkali dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat (publik). Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak langsung. Peningkatan konsumsi pemerintah seyogyanya juga diikuti oleh peningkatan pada rata-rata konsumsi pemerintah per kapita. Pada tahun 2016 konsumsi pemerintah per kapita adh berlaku sebesar 2.582,03 ribu rupiah kemudian naik menjadi 3.060,96 ribu rupiah pada tahun 2020.

Sejalan dengan konsumsi pemerintah per kapita adh berlaku yang meningkat dalam kurun waktu lima tahun terakhir, konsumsi pemerintah per kapita adh konstan (2010) juga menunjukkan hal yang sama (tabel 11). Pada tahun 2016 nilainya sebesar 1.108.679,93 juta rupiah, kemudian meningkat menjadi 1.149.565,29 juta rupiah pada tahun 2017, dan terus meningkat menjadi 1.215.547,85 juta rupiah (2018) hingga 1.280.190,43 juta rupiah pada tahun 2019. Pada tahun 2020, nilai konsumsi pemerintah ini sedikit menurun sebesar 1.231.265,07 juta rupiah, tetapi angka ini masih lebih tinggi dibanding konsumsi pada tahun 2016-2018.

Secara umum, rata-rata konsumsi pemerintah per kapita adh berlaku yang cenderung meningkat. Rata-rata konsumsi pemerintah per kapita adh konstan (2010) juga menunjukkan hal yang sama setiap tahunnya (lihat tabel 11). Meskipun mengalami peningkatan yang signifikan jika dibandingkan lima tahun lalu, tetapi konsumsi pemerintah tahun 2020 lebih rendah bila dibandingkan tahun lalu. Pada tahun 2020 nilai konsumsi pemerintah adh konstan 2020 turun -3,82 persen. Sementara itu, nilai konsumsi pemerintah per kapita terkontraksi sebesar -3,83 persen.

Kontraksi konsumsi pemerintah pada tahun 2020 merupakan kontraksi kedua sejak lima tahun terakhir, setelah sebelumnya kontraksi terjadi pada tahun 2016. Pada tahun 2016, kontraksi dipicu oleh kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah. Berbeda dengan kontraksi konsumsi pemerintah tahun 2016, pada tahun 2020 kontraksi disebabkan oleh terhambatnya realisasi anggaran pemerintah akibat pembatasan ruang gerak selama masa pandemi covid-19 serta adanya kebijakan realokasi anggaran pemerintah dalam rangka penanganan pandemi covid-19.

Konsumsi pemerintah terbagi atas dua jenis konsumsi yakni konsumsi kolektif dan individu. Pada tahun 2016-2020, proporsi konsumsi pemerintah kolektif selalu lebih besar dibandingkan konsumsi individu. Lebih dari setengah konsumsi pemerintah Kabupaten Magetan berupa konsumsi kolektif.

Gambaran tentang konsumsi akhir pemerintah secara “riil” menunjukkan peningkatan baik secara keseluruhan maupun rata-rata (per penduduk maupun per pegawai pemerintah). Parameter ini adalah pendekatan untuk mengukur pemerataan kesempatan masyarakat atas penggunaan sumber daya finansial oleh pemerintah. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2018, dengan rincian untuk total konsumsi pemerintah sebesar 5,74 persen; untuk konsumsi per kapita 5,69 persen. Sementara itu, pertumbuhan terendah pada total konsumsi pemerintah terjadi pada tahun 2016 yaitu -7,76 persen, begitu pula untuk konsumsi pemerintah per kapita turun terendah pada tahun 2016 yaitu sebesar -7,85 persen.

3.2.4. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Atau pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital)⁶. Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (*indirect input*) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

Pengelompokan PMTB pada PDRB tahun dasar 2010 dibagi menjadi 2 (enam) kelompok yaitu Bangunan dan Non Bangunan. Data di bawah ini menjelaskan bahwa, PMTB juga menunjukkan peningkatan baik secara nominal maupun riil. Proporsi non bangunan terhadap total PMTB relatif berfluktuasi selama periode 2016 - 2020 (tabel 12). Perubahan yang terjadi pada proporsi tersebut tidak lepas dari pengaruh pertumbuhan yang terjadi pada masing-masing sub komponen PMTB tersebut. Proporsi sub komponen bangunan terhadap total PMTB relatif stabil sekitar 80 persen selama periode tahun 2016 - 2020.

⁶ Selain bagian lain yang menjadi konsumsi antara, konsumsi akhir, ataupun diekspor

**Tabel 12. Perkembangan dan Struktur PMTB
Kabupaten Magetan, Tahun 2016 – 2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total PMTB					
a. ADHB (<i>Juta Rp</i>)	3.363.067,35	3.695.450,07	4.047.632,26	4.405.327,91	4.227.912,04
b. ADHK 2010 (<i>Juta Rp</i>)	2.528.339,52	2.676.346,21	2.840.277,83	2.997.921,85	2.839.431,13
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	22,13	22,68	22,97	23,37	22,52
Struktur PMTB ⁷					
a. Bangunan (<i>Juta Rp</i>)	2.725.241,71	2.974.061,79	3.253.438,42	3.551.602,34	3.403.243,35
(%)	(81,03)	(80,48)	(80,38)	(80,62)	(80,49)
b. Non Bangunan (<i>Juta Rp</i>)	637.825,64	794.193,84	794.193,84	853.725,57	824.668,69
(%)	(18,97)	(19,52)	(19,62)	(19,38)	(19,51)
Total PMTB (<i>Juta Rp</i>)	3.363.067,35	3.695.450,07	4.047.632,91	4.405.327,91	4.227.912,04
(%)	(100,00)	(100,00)	(100,00)	(100)	(100)
Pertumbuhan ⁸ (%)					
a. Bangunan	5,77	5,48	5,94	5,58	-5,06
b. Non Bangunan	5,69	7,37	6,87	5,44	-6,20
Total PMTB	5,75	5,85	6,13	5,55	-5,29

Sementara jika dilihat pertumbuhannya, secara keseluruhan pertumbuhan PMTB dalam kurun waktu 2016 - 2020 menunjukkan pola yang variatif antar tahunnya. Pada tahun 2016 total pertumbuhan PMTB sebesar 5,75 persen dan tumbuh menjadi sebesar 5,85 persen pada tahun 2017, kemudian tumbuh lebih cepat pada tahun 2018 dengan pertumbuhan sebesar 6,13 persen (2018). Namun, pada tahun 2019 pertumbuhannya sedikit melambat menjadi sebesar 5,55 persen. Pada tahun 2020, pertumbuhannya negatif karena terdampak pandemi covid-19.

Pertumbuhan per sub komponen PMTB menunjukkan pola pertumbuhan yang fluktuatif baik pada pertumbuhan komponen bangunan maupun pertumbuhan pada komponen non bangunan. Pada tahun 2016 pertumbuhan komponen bangunan sebesar 5,77 persen dan cenderung stabil hingga tahun 2019 sebesar 5,58 persen. Pandemi covid-19 yang melanda Kabupaten Magetan selama tahun 2020 telah menghambat proses pembangunan beberapa proyek infrastruktur, baik yang dikelola pemerintah maupun non pemerintah. Hal ini berdampak pada terbatasnya penciptaan asset fisik pada tahun tersebut sehingga menyebabkan pertumbuhan riil PMTB bangunan mengalami kontraksi sedalam -5,29 persen.

⁷Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga berlaku /ADHB)

⁸ Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan/ADHK 2010)

Dalam lima tahun terakhir, PMTB non bangunan memberikan kontribusi sekitar 18-19 persen setiap tahunnya. Selama kurun waktu 2016-2019 pertumbuhan PMTB non bangunan mampu tumbuh di atas 5 persen dan cenderung stabil. Pertumbuhan tertinggi tercipta pada tahun 2017 sebesar 7,37 persen. Namun, pada tahun 2020 PMTB non bangunan mengalami kontraksi sedalam -6,20 persen. Selama tahun 2020, pembatasan interaksi antar wilayah untuk menekan penyebaran virus covid-19 semakin masif. Hal ini turut menghambat pemenuhan barang-barang modal dalam wilayah Magetan.

3.2.5. Perubahan Inventori

Secara konsep, yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk “**persediaan**” berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi ataupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud disini bisa berarti penambahan (bertanda positif) dan atau pengurangan (bertanda negatif).

Dari sisi penghitungan, komponen Perubahan Inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa memiliki 2 (dua) tanda angka, positif atau negatif. Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

**Tabel 13. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori
Kabupaten Magetan, Tahun 2016 – 2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Inventori					
a. ADHB (<i>Juta Rp</i>)	71.362,96	71.930,45	78.739,88	80.210,51	39.420,30
b. ADHK 2010 (<i>Juta Rp</i>)	44.040,75	44.312,96	44.490,44	44.663,92	21.573,86
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	0,47	0,44	0,45	0,43	0,21

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis agak rinci, perubahan inventori baru dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen inventori tidak banyak dikaji lebih. Hal utama yang dapat dilihat dari komponen ini adalah, bahwa proporsi dalam PDRB pada umumnya mempunyai besaran atau nilai yang berfluktuasi baik dalam level maupun tandanya (positif atau negatif).

Pada Tahun 2016 perubahan inventori sebesar 71.362,96 juta rupiah. Pada tahun 2017 sedikit mengalami peningkatan menjadi sebesar 71.930,45 juta rupiah, sampai pada tahun 2019 terus mengalami peningkatan hingga 80.210,51 juta rupiah. Namun sayangnya pandemic covid-19 mampu melemahkan perekonomian di hampir seluruh wilayah Jawa Timur, tak terkecuali Kabupaten Magetan. Hal ini menyebabkan merosotnya nilai perubahan inventori hingga 21.573,86 juta rupiah pada tahun 2020.

3.2.6. Ekspor Barang dan Jasa

Dalam struktur permintaan akhir, transaksi ekspor menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi domestik, tetapi dikonsumsi oleh pihak luar negeri (non domestik), baik itu kabupaten lain di dalam satu propinsi, propinsi lain, maupun luar negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Termasuk pula dalam ekspor pembelian oleh badan-badan internasional, kedutaan besar (termasuk konsulat), awak kapal (udara maupun laut) yang singgah dan sebagainya.

**Tabel 14. Perkembangan Ekspor
Kabupaten Magetan, Tahun 2016 - 2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Ekspor					
a. ADHB (<i>Juta Rp</i>)	4.729.093,68	5.403.889,69	6.144.301,00	6.276.283,81	6.147.058,66
b. ADHK 2010 (<i>Juta Rp</i>)	3.589.104,74	3.840.242,06	4.091.359,55	4.217.707,86	4.107.717,70
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	31,12	33,17	34,86	33,30	32,75
Pertumbuhan Ekspor BarangDan Jasa (%-ADHK)	-	-	-	-	-

Secara umum, nilai komponen ekspor mengalami peningkatan selama kurun waktu 2016 hingga 2020. Pada tahun 2016 nilai ekspor sebesar 4.729.093,68 juta rupiah. Tahun 2017 ekspor meningkat menjadi sebesar 5.403.889,69 juta rupiah. Pada tahun berikutnya, nilai ekspor meningkat lagi sehingga menjadi sebesar 6.144.301,00 juta rupiah (2018), dan 6.276.283,81 juta rupiah pada tahun 2019. Pada tahun 2020 nilai ekspor sedikit mengalami penurunan sebesar 6.147.058,66 juta rupiah. Sejalan dengan nilai ekspor adh berlaku, nilai ekspor adh konstan 2010 juga menunjukkan arah pertumbuhan yang sama, yaitu cenderung meningkat dengan nilai “riil” dalam rentang waktu tersebut. Masing-masing tahun nilainya sebagai berikut; tahun 2016 sebesar 3.589.104,74 juta rupiah dan terus meningkat pada tahun berikutnya dengan nilai masing-masing sebesar 3.840.242,06 juta rupiah (2017), 4.091.359,55 juta rupiah (2018), 4.217.707,86 juta rupiah (2019), serta pada tahun 2020 sedikit mnegalami penurunan menjadi sebesar 4.107.717,70 juta rupiah. Hal ini juga sejalan dengan proporsinya dalam PDRB selama kurun waktu 2016 - 2020 yaitu dari 31,12 persen pada tahun 2016 kemudian pada tahun 2017 proporsinya meningkat menjadi 33,17 persen. Proporsi nilai Ekspor barang dan jasa pada tahun 2018 meningkat lagi menjadi 34,86 persen. Namun, pada tahun 2019 dan tahun 2020 proporsi nilai ekspor barang dan jasa sedikit turun menjadi sebesar 33,30 persen dan 32,75 persen.

3.2.7. Impor Barang dan Jasa

Aktivitas pengeluaran (konsumsi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah) maupun PMTB (termasuk inventori) dan ekspor, didalamnya terkandung produk yang berasal dari impor. PDRB menggambarkan produk yang benar-benar dihasilkan oleh ekonomi domestik Kabupaten Magetan. Sehingga untuk mengukur potensi dan besaran produk domestik, maka komponen impor tersebut harus dikeluarkan dari penghitungan yaitu dengan cara

mengurangkan nilai PDRB (E) dengan nilai impornya. Hasil pengurangan inilah yang secara konsep harus sama dengan nilai PDRB menurut lapangan usaha (sektor).

Berbeda dengan komponen ekspor, transaksi impor menjelaskan ada tambahan penyediaan (*supply*) produk di wilayah ekonomi domestik yang berasal dari non residen. Impor terdiri dari produk barang maupun jasa, meskipun rincian penggolongannya bisa berbeda dengan ekspor.

Perkembangan yang terjadi pada transaksi impor menunjukkan semakin kuatnya ketergantungan Kabupaten Magetan terhadap ekonomi atau produk wilayah atau negara lain. Komponen impor termasuk pembelian berbagai produk barang dan jasa secara langsung (*direct purchase*) oleh penduduk (*resident*) Kabupaten Magetan di luar wilayah, baik yang berupa makanan maupun bukan makanan (termasuk jasa).

Tabel 15 di bawah menunjukkan pola perkembangan impor Kabupaten Magetan pada periode tahun 2016 s.d 2020 yang cenderung meningkat (baik adh berlaku maupun adh konstan 2010). Pada tahun 2016 nilai impor mencapai 5.630.460,30 juta rupiah dan terus mengalami peningkatan sebesar 6.480.713,95 juta rupiah (2017), 7.451.893,63 juta rupiah (2018) dan sebesar 7.795.325,36 juta rupiah (2019). Pada tahun 2020, nilai impor sedikit turun bila dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 7.510.245,44 juta rupiah.

Tabel 15. Perkembangan Impor Barang dan Jasa Kabupaten Magetan, Tahun 2016 - 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Impor					
c. ADHB (<i>Juta Rp</i>)	5.630.460,30	6.480.713,95	7.451.893,63	7.808.325,36	7.510.245,44
d. ADHK 2010 (<i>Juta Rp</i>)	4.328.605,43	4.590.535,83	4.893.716,44	5.043.630,86	4.822.750,85
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	37,05	39,78	42,28	41,42	40,01
Pertumbuhan Impor Barang Dan Jasa (%-ADHK)	-	-	-	-	-

Proporsi impor selama periode 2016 - 2020 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2016 proporsi impor terhadap PDRB sebesar 37,05 persen dan kemudian meningkat menjadi sebesar 39,78 persen pada tahun 2017. Kemudian mengalami peningkatan proporsi sebesar menjadi 42,28 persen pada tahun 2018. Namun, pada tahun 2019 dan 2010 sedikit mengalami penurunan menjadi sebesar 41,42 persen dan 40,01 persen.



Bab IV
PERKEMBANGAN AGREGAT
PRDB PENGELUARAN
KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2016-2020

Berbagai indikator ekonomi makro yang lazim digunakan dalam analisis sosial ekonomi dapat diturunkan dari seperangkat data PRDB. Berikut ini akan disajikan beberapa rasio (perbandingan relatif) guna melengkapi analisis, di tengah keterbatasan informasi yang tersedia.

4.1 PDRB (NOMINAL)

Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam suatu wilayah ekonomi domestik, di mana di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran “produktivitas”, karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan nilai tambah, pengeluaran, dan pendapatan.

Dari series data PDRB pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain (seperti rumah tangga, dan tenaga kerja). Sebagai contoh, untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan, misalnya, maka disajikan data PDRB per kapita

**Tabel 16. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Per kapita
Kabupaten Magetan, Tahun 2016 – 2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (<i>Juta Rp</i>)					
- ADHB	15.196.416,51	16.293.369,22	17.623.924,55	18.850.232,70	18.771.762,65
- ADHK 2010	11.398.131,44	11.978.058,06	12.602.600,24	13.237.472,80	13.020.890,72
PDRB per kapita (<i>Rp</i>)					
- ADHB	24.198.732	25.919.720	28.022.344	29.969.669	29.842.871
- ADHK 2010	18.150.353	19.054.863	20.038.352	21.046.036	20.700.281
Pertumbuhan					
PDRB per kapita ADHK 2010	5,31	5,09	5,21	5,04	-1,64
Jumlah penduduk (<i>jiwa</i>)	627.984	628.609	628.924	628.977	629.020

Tabel 16 menunjukkan peningkatan PDRB per kapita Kabupaten Magetan dari tahun ke tahun yang seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Kabupaten Magetan rata-rata mampu menciptakan PDRB atau (nilai tambah) sebesar nilai per kapita di masing-masing tahun tersebut.

Sementara itu pertumbuhan PDRB per kapita secara “riil” juga selalu meningkat di kisaran 5 persen. Pertumbuhan ekonomi tersebut diikuti pula oleh penambahan jumlah penduduk yang meningkat setiap tahunnya. Dengan demikian pertumbuhan per kapita tersebut tidak saja terjadi secara “riil” tetapi juga terjadi secara kualitas. Namun, pada tahun 2020, pertumbuhan PDRB per kapita mengalami kontraksi akibat pandemi covid-19 yang menyebabkan terkontraksinya pertumbuhan ekonomi.

4.2 PERBANDINGAN PENGELUARAN PDRB UNTUK KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP EKSPOR

Indikator ini menunjukkan perbandingan antara produk yang dikonsumsi rumah tangga di wilayah domestik dengan produk yang diekspor. Selama ini konsumsi rumah tangga mempunyai kontribusi yang sangat dominan dalam penggunaan PDRB Kabupaten Magetan berkisar 71-76 persen, yang artinya bahwa seluruh produk yang dihasilkan di wilayah Kabupaten Magetan sebagian besar digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga. Namun di dalamnya termasuk pula sebagian produk yang berasal dari impor.

Tabel 17. Perbandingan PDRB Pengeluaran untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor Tahun 2016 - 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga (ADHB)(Juta Rp)	10.856.507,82	11.658.535,90	12.658.899,78	13.572.038,23	13,579,285.13
Total Ekspor (ADHB) (Juta Rp)	4.729.093,68	5.403.889,69	6.144.301,00	6.276.283,8	6.147.058,66
Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga thd Ekspor	2,30	2,16	2,06	2,16	2,21

Data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2016, produk yang digunakan untuk konsumsi rumah tangga sebanyak 2,30 kali dari yang diekspor. Ini berarti bahwa sebagian besar penyediaan (*supply*) domestik diserap untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir rumah tangga. Selama periode 2016 - 2020, rasio perbandingan konsumsi rumah tangga terhadap ekspor menunjukkan kecenderungan fluktuatif, namun cenderung mengalami penurunan dari sebesar 2,30 (2016); 2,16 (2017); 2,06 (2018); 2,16 (2019) dan 2,21 (2020). Secara implisit data 2016-2020 menjelaskan bahwa nilai konsumsi akhir rumah tangga dan ekspor semakin meningkat namun peningkatan nilai ekspor sedikit lebih cepat. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh perubahan volume maupun harga. Akibatnya nilai rasio

konsumsi rumah tangga mengalami penurunan, karena pertumbuhan konsumsi akhir rumah tangga yang lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan ekspor.

4.3 PERBANDINGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)

Rasio ini merupakan perbandingan antara produk yang digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga dengan yang digunakan untuk investasi fisik (pembentukan modal tetap). Sekilas nampak bahwa sebagian besar penggunaan produk yang tersedia di wilayah domestik Kabupaten Magetan digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga.

**Tabel 18. Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB
Tahun 2016 – 2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga (ADHB)(Juta Rp)	10.856.507,82	11.658.535,90	12.658.899,78	13.572.038,23	13,579,285.13
Total PMTB (ADHB) (Juta Rp)	3.363.067,35	3.695.450,07	4.047.632,26	4.405.327,91	4.227.912,04
Perbandingan Konsumsi Rumah Tanggathd PMTB	3,23	3,15	3,13	3,08	3,21

Seperti halnya terhadap ekspor, rasio konsumsi rumah tangga terhadap PMTB cenderung sejalan, pada tahun 2016 sebesar 3,23 kemudian tahun-tahun berikutnya rasionya terus mengalami penurunan menjadi 3,15 (2017), 3,13 (2018), dan 3,08 (2019). Hal ini terjadi karena nilai investasi cenderung melambat, sementara konsumsi akhir rumah tangga mengalami percepatan. Selanjutnya pada tahun 2020, rasio mengalami peningkatan dikarenakan kontraksi investasi fisik jauh lebih dalam dibandingkan konsumsi rumah tangga. Hal ini dipicu oleh dampak pandemi covid-19 terhadap kinerja komponen konsumsi rumah tangga dan investasi fisik.

4.4 PROPORSI KONSUMSI AKHIR TERHADAP PDRB

Yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari produk domestik maupun impor), untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah. Walaupun ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir.

Sebagian besar barang dan jasa yang berada di wilayah domestik digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir. Meskipun konsumsi akhir makin meningkat setiap tahunnya, namun proporsinya terhadap PDRB ada kecenderungan berfluktuatif pada kisaran 83 sampai 88 persen. Dalam hal ini, produk yang tidak digunakan menjadi konsumsi akhir (PMTB atau ekspor) memiliki peran yang relatif kecil.

**Tabel 19. Proporsi Total Penggunaan Konsumsi Akhir terhadap PDRB
Kabupaten Magetan, Tahun 2016 - 2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Akhir (ADHB) (Juta Rp)					
a. Rumah tangga	10.856.507,82	11.658.535,90	12.658.899,78	13.572.038,23	13.579.285,13
b. LNPRT	185.373,10	195.515,43	213.058,03	228.944,56	235.006,43
c. Pemerintah	1.621.471,90	1.748.761,62	1.933.187,23	2.095.753,02	2.053.325,53
Jumlah	12.663.352,82	13.602.812,95	14.805.145,04	15.888.735,81	15.867.617,09
PDRB (ADHB) (Juta Rp)	15.196.416,51	16.293.369,22	17.623.924,55	18.850.232,70	18.771.762,65
Proporsi	83,33	83,49	84,00	84,26	84,53

4.5 PERBANDINGAN EKSPOR TERHADAP PMTB

Ekspor merupakan produk yang tidak dikonsumsi di wilayah domestik, tetapi diperdagangkan ke luar wilayah. Untuk menghasilkan produk yang diekspor kemungkinan besar menggunakan kapital (PMTB). Sementara di sisi lain sebagian barang yang diekspor bisa pula berupa barang kapital. Rasio ekspor terhadap PMTB dimaksudkan untuk menunjukkan perbandingan antara nilai produk ekspor dengan nilai produk yang menjadi kapital (PMTB).

**Tabel 20. Rasio Ekspor terhadap PMTB (ADHB)
Tahun 2016 – 2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Ekspor (ADHB) (Juta Rp)	4.729.093,68	5.403.889,69	6.144.301,00	6.276.283,81	6.147.058,66
Total PMTB (ADHB) (Juta Rp)	3.363.067,35	3.695.450,07	4.047.632,26	4.405.327,91	4.227.912,04
Rasio Ekspor terhadap PMTB	1,41	1,46	1,52	1,43	1,45

Selama tahun 2016-2020, ekspor mempunyai nilai yang lebih tinggi dari PMTB dan rasio ekspor terhadap PMTB juga mempunyai kecenderungan relatif stabil dari tahun 2016 sebesar 1,41, kemudian meningkat pada tahun 2017 menjadi 1,46, selanjutnya terus meningkat pada tahun 2018 di angka 1,52 (tabel 20). Pada tahun 2019 kembali menurun menjadi 1,43. Namun, pada tahun 2020 kembali meningkat hingga 1,45. Untuk menghasilkan seluruh produk domestik (termasuk ekspor) disyaratkan tersedianya sejumlah kapital (yang di dalamnya termasuk pula kapital impor). Peningkatan rasio tahun 2016-2018 di antaranya disebabkan oleh kenaikan ekspor yang relatif lebih pesat dibandingkan dengan kenaikan PMTB. Sebaliknya pada tahun 2019, laju kenaikan ekspor lebih lambat dibandingkan dengan kenaikan PMTB. Pada tahun 2020, kedua komponen ini mengalami pertumbuhan negative sebagai dampak pandemi covid-19, tetapi kontraksi PMTB lebih dalam sehingga terjadi kenaikan rasio pada tahun 2020 menjadi 1,45.

4.6 PERBANDINGAN PDRB TERHADAP IMPOR

Rasio ini memberikan gambaran tentang perbandingan antara produk yang dihasilkan di wilayah ekonomi domestik (PDRB) dengan produk yang berasal dari impor. Selain itu data tersebut menjelaskan tentang ketergantungan PDRB terhadap produk yang dihasilkan dari luar wilayah. Jika rasionya kecil berarti ketergantungan akan impor semakin tinggi, dan sebaliknya.

Tabel 21. Rasio PDRB terhadap Impor Kabupaten Magetan Tahun 2016 – 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB (ADHB) (Juta Rp)	15.196.416,51	16.293.369,22	17.623.924,55	18.850.232,70	18.771.762,65
Total Impor (ADHB) (Juta Rp)	5.630.460,30	6.480.713,95	7.451.893,63	7.808.325,36	7.510.245,44
Rasio PDRB terhadap Impor	2,70	2,51	2,37	2,42	2,50

Tabel 21 menunjukkan rasio PDRB terhadap impor selama tahun 2016 - 2020 cenderung fluktuatif, pada tahun 2016 sebesar 2,70 mengalami penurunan menjadi 2,51 pada tahun 2017. Kemudian terus mengalami penurunan menjadi sebesar 2,37 pada tahun 2018. Pada tahun 2019, rasio PDRB terhadap impor mengalami peningkatan menjadi 2,42. Pada tahun 2020 kembali mengalami peningkatan menjadi 2,50. Peningkatan rasio menunjukkan ketergantungan PDRB terhadap produk impor yang semakin menurun.

4.7 KESEIMBANGAN TOTAL PENYEDIAAN DAN TOTAL PERMINTAAN

Rasio ini dapat menunjukkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi suatu daerah oleh produk yang berasal dari impor. Ketergantungan (ketidakseimbangan) tersebut dapat dilihat melalui keseimbangan antara total penyediaan (*supply*) dengan total permintaan akhir (*demand*).

Dari tabel di bawah ini, dapat dilihat bahwa untuk memenuhi permintaan akhir domestik sebagian produk masih harus didatangkan dari luar negeri dan luar daerah, dengan rentang 27 s.d 30 persen. Dengan kata lain, kebutuhan masyarakat baru bisa dipenuhi sekitar 70 persen dari selisih hasil produksi domestik. Dalam kurun waktu tersebut, tendensi permintaan (akhir) masyarakat terus meningkat setiap tahunnya, dari 20.826.876,81 juta (2016) menjadi sebesar 26.282.008,09 juta rupiah (2020).

Tabel 22. Sisi Keseimbangan Penyediaan dan Permintaan Kabupaten Magetan, Tahun 2016 – 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Penyediaan					
PDRB (ADHB)	15.196.416,51	16.293.369,22	17.623.924,55	18.850.232,70	18.771.762,65
(Juta Rp)	(72,97)	(71,54)	(70,28)	(70,75)	(71,42)
%					
Total nilai Impor ADHB	5.630.460,30	6.480.713,95	7.451.893,63	7.808.325,36	7.510.245,44
(Juta Rp)	(27,03)	(28,46)	(29,72)	(29,25)	(28,58)
%					
Total Permintaan					
<u>Akhir</u> ¹ (Juta Rp)	20.826.876,81	22.774.083,17	25.075.818,18	26.658.558,05	26.282.008,09
%	(100,00)	(100,00)	(100,00)	(100,00)	(100)

Di sisi lain “penyediaan” produk barang dan jasa yang mampu dihasilkan oleh ekonomi domestik masing-masing sebesar 15.196.416,51 juta rupiah (2016); 16.293.369,22 juta rupiah (2017); 17.623.924,55 juta rupiah (2018); 18.850.232,70 juta rupiah (2019); dan 18.771.762,65 juta rupiah (2020). Secara umum, penyediaan produk barang dan jasa mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Meskipun demikian, produk domestik tidak mampu mencukupi seluruh kebutuhan permintaan, maka berbagai produk barang dan jasa harus diimpor. Total impor juga mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir dari 5.630.460,30 juta rupiah (2016) menjadi 7.510.245,44 juta rupiah (2020).

¹ Termasuk diskrepansi statistik

4.8 NERACA PERDAGANGAN (TRADE BALANCE)

Transaksi devisa yang berasal dari perdagangan barang dan jasa dengan pihak luar negeri (non-residen) dapat dilihat melalui neraca perdagangan. Secara konsep, selisih antara nilai ekspor dan nilai impor disebut sebagai “**Ekspor Neto**”, apabila nilai ekspor lebih besar dari nilai impor, maka terjadi surplus, dan sebaliknya yang terjadi adalah defisit. Dilihat dari arus uang yang masuk atau keluar, apabila tingkat keseimbangan dalam posisi surplus, maka terjadi aliran devisa masuk, sebaliknya kalau posisinya defisit maka terjadi aliran devisa keluar. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa kekuatan ekonomi suatu wilayah di antaranya ditentukan oleh proses tersebut.

Selain gambaran posisi neraca perdagangan, dapat juga dilihat perbandingan (rasio) antara nilai ekspor terhadap impor, meskipun hanya berlaku secara total. Namun rasio tersebut tidak dapat merefleksikan perbandingan menurut jenis komoditas, harga maupun kuantum. Apabila rasio lebih besar dari 1 (satu) maka nilai ekspor lebih tinggi daripada nilai impor, sebaliknya apabila rasio kurang dari 1 (satu) berarti nilai impor lebih tinggi dari pada nilai ekspor. Besar kecilnya ekspor atau impor suatu wilayah sangat tergantung kepada kondisi ekonomi serta kebutuhan masyarakatnya.

Tabel 23. Neraca Perdagangan Barang dan Jasa, Kabupaten Magetan Tahun 2016 – 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai Ekspor (ADHB) (Juta Rp)	4.729.093,68	5.403.889,69	6.144.301,00	6.276.283,81	6.147.058,66
Nilai Impor (ADHB)(Juta Rp)	5.630.460,30	6.480.713,95	7.451.893,63	7.808.325,36	7.510.245,44
Net ekspor (X - M) (Juta Rp)	-901.366,62	-1.076.824,25	-1.307.592,64	-1.532.041,54	-1.363.186,77
Rasio ekspor thdp Impor	0,84	0,83	0,82	0,80	0,82

Selama periode 2016 - 2020, posisi perdagangan barang dan jasa Kabupaten Magetan dengan antar daerah dan luar negeri, selalu menunjukkan nilai negatif. Hal ini menunjukkan neraca perdagangan barang dan jasa Kabupaten Magetan berada dalam posisi defisit. Nilai ekspor yang lebih kecil dari impor menyebabkan adanya aliran devisa keluar, yang dalam konteks lain disebut sebagai “**hutang luar negeri**”. Pada tahun 2016 posisi perdagangan barang dan jasa mengalami defisit dimana nilai impor lebih besar daripada ekspor, sehingga

net ekspornya mencapai minus 901.366,62 juta rupiah. Sampai dengan tahun 2020, nilai net ekspor mencapai minus 1.363.186,77 juta rupiah.

Sementara rasio ekspor terhadap impor berada di kisaran 0,80–0,84 dari tahun 2016-2020. Pada tahun 2016 rasionya sebesar 0,84 kemudian terus menurun menjadi 0,83 pada tahun 2017; 0,82 pada tahun 2018 dan 0,80 pada tahun 2019. Pada tahun 2020 rasio ekspor terhadap impor kembali mengalami penurunan menjadi 0,82.

<https://magetankab.bps.go.id>

4.9 INCREMENTAL CAPITAL OUTPUT RATIO (ICOR)

"ICOR" merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (output) dengan menggunakan investasi tersebut. ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output (keluaran).

Kapital diartikan sebagai barang modal fisik yang dibuat oleh manusia dari sumber daya alam, untuk digunakan secara terus menerus dan berulang dalam proses produksi. Sedangkan output adalah besarnya nilai keluaran dari suatu proses ekonomi (produksi) yang dalam hal ini digambarkan melalui parameter "Nilai Tambah".

Dengan menggunakan rasio ini, maka ICOR mampu menjelaskan perbandingan antara penambahan kapital terhadap output atau yang diartikan juga bahwa setiap pertambahan satu unit nilai output (keluaran) akan membutuhkan penambahan kapital sebanyak "K" unit. Formula :

$$ICOR = \frac{\Delta K}{\Delta Y} = \frac{I}{\Delta Y} = \frac{I_t}{Y_t - Y_{t-1}}$$

Di mana: I_t = PMTB tahun ke t

Y_t = Output tahun ke t

Y_{t-1} = Output tahun ke t-1

Tabel 24. Incremental Capital Output Ratio, Kabupaten Magetan, Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB (ADHK 2010) (Juta Rp)	11.398.131,44	11.978.058,06	12.602.600,24	13.237.472,80	13.020.890,72
Perubahan (ADHK)(Juta Rp)	574.212,35	579.926,62	574.212,35	579.926,62	-216.582,08
PMTB (ADHK) (Juta Rp)	2.528.339,52	2.676.346,21	2.840.277,83	2.997.921,85	2.839.431,13
ICOR	4,40	4,61	4,55	4,72	-13,11

Data di atas menunjukkan besaran ICOR yang berfluktuatif namun cenderung stabil dari sebesar 4,40 pada tahun 2016 dan meningkat pada tahun 2017 menjadi sebesar 4,61. Pada tahun 2018 sedikit mengalami penurunan menjadi 4,55. Namun pada tahun 2019 meningkat kembali menjadi 4,72 yang artinya untuk menghasilkan 1 unit output dibutuhkan penambahan kapital sebanyak 4,72 unit pada tahun 2019. Pada tahun 2020, nilai koefisien ICOR bernilai negatif. Kondisi ini terjadi karena output yang dihasilkan selama tahun 2020 lebih kecil dibandingkan dengan output yang dihasilkan pada tahun sebelumnya, meskipun investasi fisik masih terbentuk pada tahun tersebut. Penurunan nilai output ini disebabkan oleh pandemi covid-19 yang menghambat kinerja perekonomian.

<https://magetankab.bps.go.id>



Bab V
P E N U T U P

<https://magetan.kab.bps.go.id>

1. PDRB menurut pengeluaran tahun 2016 s.d 2020 dapat menggambarkan perubahan struktur dan perkembangan kondisi ekonomi Kabupaten Magetan pada periode bersangkutan. Analisis ekonomi dari sisi PDRB pengeluaran akan berbeda dengan analisis dari sisi lapangan usaha (industri) yang lebih fokus pada perilaku produksi. Analisis PDRB pengeluaran terfokus pada perilaku penggunaan barang dan jasa akhir, baik untuk tujuan konsumsi akhir, investasi (fisik), maupun perdagangan internasional dan antar daerah. Empat kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga/LNPRT, pemerintah, dan perusahaan.
2. Publikasi ini menyajikan analisis sederhana tentang perilaku konsumsi, investasi, dan perdagangan luar negeri dan perdagangan antar daerah yang dimaksud. Analisis didasarkan pada indikator yang diturunkan dari PDRB pengeluaran. Analisis tersebut juga dilengkapi dengan indikator sosial demografi (seperti penduduk, rumah tangga, dan pegawai negeri), sehingga hasil analisis yang disajikan menjadi lebih informatif.
3. Data dapat disajikan dalam bentuk series data dari tahun 2016 s.d 2020, sehingga mudah di dalam menggambarkan perubahan atau kecenderungan yang terjadi antar waktu. Masing-masing parameter disajikan dalam satuan yang berbeda (rupiah, indeks, persentase, rasio, unit, dsb) sesuai dengan tujuan analisis dan karakteristik masing-masing data.
4. Data dan indikator yang diturunkan dari sajian data PDRB menurut pengeluaran, dapat dijadikan acuan bagi pengembangan dan perluasan indikator ekonomi makro lain seperti pendapatan disposabel, tabungan, serta model ekonomi sederhana yang saling berkaitan antara seluruh variabel ekonomi dan variabel yang tersedia. Bahkan secara langsung maupun tidak langsung dapat dikaitkan dengan tampilan data ekonomi makro lain seperti PDRB menurut lapangan usaha (industri), Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) dan bahkan Neraca Arus Dana (NAD).
5. Sebagian data tentang interaksi dengan luar negeri (*external account*) secara agregat

disajikan di sini, seperti ekspor dan impor, dan transfer berjalan (*current tranfer*) neto. Transaksi eksternal ini menggambarkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi Kabupaten Magetan terhadap ekonomi luar daerah.

<https://magetankab.bps.go.id>



LAMPIRAN

<https://magetan.kab.bps.go.id>

**Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Magetan Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Pengeluaran 2016-2020 (juta rupiah)**

JENIS PENGELUARAN / TYPE OF EXPENDITURE	PDRB Kabupaten Magetan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah) / GRDP of Magetan Regency at Current Prices by Expenditure (Million Rupiah)				
	2016	2017	2018	2019*	2020**
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga / Households Consumption Expenditure	10.856.507,82	11.658.535,90	12.658.899,78	13.572.038,23	13.579.285,13
Pengeluaran Konsumsi LNPRT / NPISHs Consumption Expenditure	185.373,10	195.515,43	213.058,03	228.944,56	235.006,43
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah / Government Consumption Expenditure	1.621.471,90	1.748.761,62	1.933.187,23	2.095.753,02	2.053.325,53
Pembentukan Modal Tetap Bruto / Gross Fixed Capital Formation	3.363.067,35	3.695.450,07	4.047.632,26	4.405.327,91	4.227.912,04
Perubahan Inventori / Changes in Inventories	71.362,96	71.930,45	78.739,88	80.210,51	39.420,30
Net Ekspor Barang dan Jasa/ Net Export of Goods and Services	-901.366,62	-1.076.824,25	-1.307.592,64	-1.532.041,54	-1.363.186,77
PDRB / GRDP	15.196.416,51	16.293.369,22	17.623.924,55	18.850.232,70	18.771.762,65

*Angka sementara

**Angka sangat sementara

**Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Magetan Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Pengeluaran 2016-2020 (juta rupiah)**

JENIS PENGELUARAN / TYPE OF EXPENDITURE	PDRB Kabupaten Magetan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah) / GRDP of Magetan Regency at 2010 Constant Prices by Expenditure (Million Rupiah)				
	2016	2017	2018	2019*	2020**
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga / <i>Households Consumption Expenditure</i>	8.331.676,30	8.731.563,60	9.172.090,77	9.602.420,81	9.505.232,20
Pengeluaran Konsumsi LNPR / <i>NPISHs Consumption Expenditure</i>	124.895,63	126.563,78	132.550,25	138.199,20	138.421,60
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah / <i>Government Consumption Expenditure</i>	1.108.679,93	1.149.565,29	1.215.547,85	1.280.190,43	1.231.265,07
Pembentukan Modal Tetap Bruto / <i>Gross Fixed Capital Formation</i>	2.528.339,52	2.676.346,21	2.840.277,83	2.997.921,85	2.839.431,13
Perubahan Inventori / <i>Changes in Inventories</i>	44.040,75	44.312,96	44.490,44	44.663,92	21.573,86
Net Ekspor Barang dan Jasa/ <i>Net Export of Goods and Services</i>	-739.500,69	-750.293,77	-802.356,89	-825.923,42	-715.033,15
PDRB / GRDP	11.398.131,44	11.978.058,06	12.602.600,24	13.237.472,80	13.020.890,72

*Angka sementara

**Angka sangat sementara

**Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Magetan
Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran 2016-2020 (persen)**

JENIS PENGELUARAN / TYPE OF EXPENDITURE	Distribusi PDRB Kabupaten Magetan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Persen) / Percentage Distribution of GRDP of Magetan Regency at Current Prices by Expenditure (Percent)				
	2016	2017	2018	2019*	2020**
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga / Households Consumption Expenditure	71,44	71,55	71,83	72,00	72,34
Pengeluaran Konsumsi LNPRT / NPISHs Consumption Expenditure	1,22	1,20	1,21	1,21	1,25
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah / Government Consumption Expenditure	10,67	10,73	10,97	11,12	10,94
Pembentukan Modal Tetap Bruto / Gross Fixed Capital Formation	22,13	22,68	22,97	23,37	22,52
Perubahan Inventori / Changes in Inventories	0,47	0,44	0,45	0,43	0,21
Net Ekspor Barang dan Jasa/ Net Export of Goods and Services	-5,93	-6,61	-7,42	-8,13	-7,26
PDRB / GRDP	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

*Angka sementara

**Angka sangat sementara

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Magetan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran 2016-2020 (persen)

JENIS PENGELUARAN / TYPE OF EXPENDITURE	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Magetan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (Persen)				
	2016	2017	2018	2019*	2020**
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga / <i>Households Consumption Expenditure</i>	4,74	4,80	5,05	4,69	-1,01
Pengeluaran Konsumsi LNPRT / <i>NPISHs Consumption Expenditure</i>	3,33	1,34	4,73	4,26	0,16
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah / <i>Government Consumption Expenditure</i>	-7,76	3,69	5,74	5,32	-3,82
Pembentukan Modal Tetap Bruto / <i>Gross Fixed Capital Formation</i>	5,75	5,85	6,13	5,55	-5,29
Perubahan Inventori / <i>Changes in Inventories</i>	-	-	-	-	-
Net Ekspor Barang dan Jasa/ <i>Net Export of Goods and Services</i>	-	-	-	-	-
PDRB / GRDP	5,31	5,09	5,21	5,04	-1,64

*Angka sementara

**Angka sangat sementara

**Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100) Kabupaten Magetan
Menurut Pengeluaran 2016-2020 (persen)**

JENIS PENGELUARAN / TYPE OF EXPENDITURE	Indeks Harga Implisit PDRB Kabupaten Magetan Menurut Pengeluaran (Persen) / Growth Rate of Implicit Price Index of GRDP of Magetan Regency by Expenditure (Percent)				
	2016	2017	2018	2019*	2020**
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga / <i>Households Consumption Expenditure</i>	130,30	133,52	138,02	141,34	142,86
Pengeluaran Konsumsi LNPRT / <i>NPISHs Consumption Expenditure</i>	148,42	154,48	160,74	165,66	169,78
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah / <i>Government Consumption Expenditure</i>	146,25	152,12	159,04	163,71	166,77
Pembentukan Modal Tetap Bruto / <i>Gross Fixed Capital Formation</i>	133,01	138,08	142,51	146,95	148,90
Perubahan Inventori / <i>Changes in Inventories</i>	-	-	-	-	-
Net Ekspor Barang dan Jasa/ <i>Net Export of Goods and Services</i>	-	-	-	-	-
PDRB / GRDP	133,32	136,03	139,84	142,40	144,17

*Angka sementara

**Angka sangat sementara



DAFTAR PUSTAKA

<https://magetanlib.bps.go.id>

1. Badan Pusat Statistik, *Tabel Input Output Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
2. *Incremental Capital Output Ratio Sektor Industri, 1980-1990*, Jakarta.
3. _____, *Kabupaten Magetan Dalam Angka*, berbagai seri, Magetan.
4. _____, *Pendapatan Nasional Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
5. _____, *Proyeksi Penduduk 2010-2035*, berbagai seri, Jakarta
6. _____, *Statistik Industri*, berbagai seri, Jakarta.
7. _____, *Statistik Listrik, Gas dan Air*, berbagai seri, Jakarta.
8. _____, *Statistik Pertambangan Migas*, berbagai seri, Jakarta.
9. _____, *Statistik Pertambangan Non Migas*, berbagai seri, Jakarta.
10. _____, *Statistik Konstruksi*, berbagai seri, Jakarta.
11. _____, *Statistik Matriks Investasi Pemerintah Pusat*, berbagai seri, Jakarta.
12. _____, *Statistik Keuangan BUMN dan BUMD, 1997*, Jakarta 2000.
13. _____, *Profil Ekonomi Rumahtangga 1998*, Jakarta 1999.
14. Frenken Jim, *How To Measure Tangible Capital Stocks*, Netherlands, 1992.
15. Host Poul, Madsen, *Macroeconomic Accounts An Overview*, Pamphlet Series, No. 29, Washington DC, 1979.
16. Keuning. J. Steven, *An Estimate of the Fixed Capital Stock By Industry and Types of Capital Goods in Indonesia*, Statistical Analysis Capability Program, Project Working Paper, Series No.4, Jakarta 1988.

17. United Nations, *A System of National Accounts, Studies in Methods, Series F No.2 Rev.3*, New York, 1968.
18. _____, *Input-Output Table and Analysis, Studies in Methods, Series F No. 14 Rev 1*, New York, 1973.
19. _____, *Handbook of National Accounting for Production, Sources and Methods, Series F No. 39*, New York, 1986.
20. _____, *Handbook of National Accounting, Public Sector Accounts, Studies Methods, Series F No. 50*, New York, 1988.
21. _____, *Link between Business Accounting and National Accounting, Public Sector Accounts, Studies Methods, Series F No. 76*, New York, 2000.
22. Verbiest Piet, *Investment Matrix, Hasil Kerjasama Asian Development Bank dengan Badan Pusat Statistik, Jakarta*, 1997.
23. Ward, Michael, *The Measurement of Capital: Methodology of Capital Stock Estimates in OECD Countries*, Paris, 1976.
22. World Bank, *System of National Accounts 1993*, Bahan Kursus, Washington DC, 1993.

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<https://magetankab.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN MAGETAN**

Jl. Mayjend Sukowati No. 1A Magetan
Telp/Fax : (0351) 895098
Homepage : www.magetankab.bps.go.id
Email : bps3520@bps.go.id

ISSN 2797-5177



9 772797 517009